






BADAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN KEUANGAN


LAPORAN KEUANGAN 2017

AUDITED

 021-72444912

 www.bppk.kemenkeu.go.id

 Jalan Purnawarman No. 99,

 Kebayoran Baru, Jakarta

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN RI

Laporan Keuangan
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2017



Jalan Purnawarman Nomor 99, Kebayoran Baru
Jakarta

KATA PENGANTAR

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Informasi yang dihasilkan tersebut diharapkan dapat berguna bagi para pengguna laporan guna menilai akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi bagi manajemen Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dalam pengambilan keputusan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, April 2018

Kepala BPPK,



Astera Primanto Bhakti
NIP 19680120 199201 1 003

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Pernyataan Tanggung Jawab	iv
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	6
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	7
V. Catatan atas Laporan Keuangan	8
A. Penjelasan Umum	8
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	25
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	42
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	72
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	78
VI. Lampiran	

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
JALAN PURNAWARMAN NOMOR 99, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN 12110, PO BOX 4807
TELEPON (021)-7394666 FAKSMILE (021) 72444912


PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan tingkat Eselon I selaku UAPPA-E1 yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggung jawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, April 2018

Kepala BPPK,


Astera Primanto Bhakti
NIP 19680120 199201 1 003

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Tahun 2017 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017. Realisasi Pendapatan Negara pada 31 Desember 2017 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp49.684.081.117, termasuk Pendapatan BLU sebesar Rp45.098.460.062. Nilai PNBP ini mencapai 124,85 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp39.795.132.000.

Realisasi Belanja Negara pada 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp650.125.131.940 atau mencapai 89,11 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp729.554.964.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2017. Nilai Aset per 31 Desember 2017 dicatat dan disajikan sebesar Rp6.825.129.623.618 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 94.128.465.647; Aset Tetap (neto) sebesar Rp6.722.157.797.890; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp41.850.000; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp 8.801.510.081.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp2.872.496.380 dan Rp6.822.257.127.238.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp47.637.372.009, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp625.682.352.168 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp578.044.980.159. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp877.290.163 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp577.167.689.996.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2017 adalah sebesar Rp2.144.570.112.820 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp577.167.689.996 kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp4.643.784.630.716 dan Transaksi Antar Entitas senilai Rp611.070.073.698, sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2017 adalah senilai Rp6.822.257.127.238.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas, sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 31 DESEMBER 2016**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2017		% thd Angg	31 Desember 2016
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	39.795.132.000	49.684.081.117	124,85	42.624.547.490
JUMLAH PENDAPATAN		39.795.132.000	49.684.081.117	124,85	42.624.547.490
BELANJA	B.2.				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.3	82.314.232.000	78.720.372.595	95,63	76.010.361.486
Belanja Barang	B.4	556.867.469.000	485.787.347.824	87,24	420.941.035.074
Jumlah Belanja Operasi		639.181.701.000	564.507.720.419	88,32	496.951.396.560
Belanja Modal					
Belanja Tanah	B.5.1	2.000.000	1.854.000	92,70	-
Belanja Peralatan dan Mesin	B.5.2	65.133.957.000	61.500.044.908	94,42	19.339.449.133
Belanja Gedung dan Bangunan	B.5.3	17.808.919.000	17.246.278.494	96,84	103.590.988.746
Belanja Jalan, Irigasi, Jaringan	B.5.4	446.232.000	384.577.600	86,18	258.844.150
Belanja Modal Lainnya	B.5.5	1.036.215.000	894.482.979	86,32	3.783.665.477
Belanja Modal BLU	B.6	5.945.940.000	5.590.173.540	94,02	-
Jumlah Belanja Modal		90.373.263.000	85.617.411.521	94,74	126.972.947.506
JUMLAH BELANJA		729.554.964.000	650.125.131.940	89,11	623.924.344.066

II. NERACA

**BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 31 DESEMBER 2016**

(Dalam Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% KENAIKAN (PENURUNAN)
ASET				
Aset Lancar				
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	Rp -	Rp 21.275.000	-100,00
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	Rp 10.000.000	Rp -	0,00
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	Rp 1.865.808.583	Rp 23.858.115	7720,44
Kas pada Badan Layanan Umum	C.4	Rp 86.380.679.103	Rp 9.025.237.045	857,10
Investasi Jangka Pendek - BLU	C.5	Rp -	Rp 70.000.000.000	-100,00
Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)	C.6	Rp -	Rp 556.000.000	-100,00
Uang Muka Belanja (Prepayment)	C.7	Rp 2.325.422	Rp 5.164.011	-54,97
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	C.8	Rp 215.013.699	Rp 366.468.138	-41,33
Piutang Bukan Pajak		Rp 2.514.327.607	Rp 996.586.386	152,29
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak		Rp (914.048.938)	Rp (792.230.946)	15,38
Piutang Bukan Pajak (Netto)	C.9	Rp 1.600.278.669	Rp 204.355.440	683,09
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi		Rp -	Rp 1.312.435.303	-100,00
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan TGR		Rp -	Rp (1.304.122.803)	-100,00
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR (Netto)	C.10	Rp -	Rp 8.312.500	-100,00
Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum		Rp 290.350.000	Rp 290.350.000	0,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU		Rp (145.175.000)	Rp (145.175.000)	0,00
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU (Netto)	C.11	Rp 145.175.000	Rp 145.175.000	0,00
Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum		Rp 467.335.113	Rp 467.335.113	0,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU		Rp (467.335.113)	Rp (467.335.113)	0,00
Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU (Netto)	C.12	Rp -	Rp -	0,00
Persediaan	C.14	Rp 3.909.185.171	Rp 4.141.872.679	-5,62
Persediaan Badan Layanan Umum	C.15	Rp -	Rp 648.178.240	-100,00
Jumlah Aset Lancar		Rp 94.128.465.647	Rp 85.145.896.168	10,55
Aset Tetap				
Tanah	C.16	Rp 5.702.028.221.000	Rp 703.853.145.401	710,12
Tanah Badan Layanan Umum	C.17	Rp -	Rp 521.249.931.524	-100,00
Peralatan dan Mesin	C.18	Rp 320.598.980.382	Rp 202.681.625.819	58,18
Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum	C.19	Rp -	Rp 55.029.304.654	-100,00
Gedung dan Bangunan	C.20	Rp 900.253.028.051	Rp 655.852.071.660	37,26
Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum	C.21	Rp -	Rp 199.435.548.155	-100,00
Jalan Irigasi dan Jaringan	C.22	Rp 36.419.374.778	Rp 27.484.841.688	32,51
Jalan Irigasi dan Jaringan Badan Layanan Umum	C.23	Rp -	Rp 20.713.710.564	-100,00
Aset Tetap Lainnya	C.24	Rp 16.280.591.524	Rp 6.309.260.496	158,04
Aset Tetap Lainnya Badan Layanan Umum	C.25	Rp -	Rp 11.171.587.251	-100,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.26	Rp 5.550.698.300	Rp 5.615.079.100	-1,15
Konstruksi Dalam Pengerjaan Badan Layanan Umum	C.27	Rp -	Rp -	0,00
Akumulasi Penyusutan	C.28	Rp (258.973.096.145)	Rp (355.509.071.417)	-27,15
Jumlah Aset Tetap		Rp 6.722.157.797.890	Rp 2.053.887.034.895	227,29

Lanjut

Lanjutan ...

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% KENAIKAN (PENURUNAN)
Piutang Jangka Panjang				
Piutang Tagihan TP/TGR	C.29	Rp 1.351.942.144	Rp -	0,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - TP/TGR	C.30	Rp (1.310.092.144)	Rp -	0,00
Jumlah Piutang Jangka Panjang		Rp 41.850.000	Rp -	0,00
Aset Lainnya				
Aset Tak Berwujud	C.32	Rp 9.613.161.972	Rp 7.258.491.222	32,44
Aset Tak Berwujud Badan Layanan Umum	C.33	Rp -	Rp 2.285.211.250	-100,00
Aset Lain-Lain	C.34	Rp 14.836.529.031	Rp 12.218.867.485	21,42
Aset Lain-Lain Badan Layanan Umum	C.35	Rp -	Rp 2.571.365.577	-100,00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.36	Rp (15.648.180.922)	Rp (17.301.877.162)	-9,56
Jumlah Aset Lainnya		Rp 8.801.510.081	Rp 7.032.058.372	25,16
JUMLAH ASET		Rp 6.825.129.623.618	Rp 2.146.064.989.435	218,03
KEWAJIBAN				
Kewajiban Jangka Pendek				
Uang Muka dari KPPN	C.38	Rp -	Rp 21.275.000	-100,00
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.37	Rp 2.850.274.811	Rp 880.746.242	223,62
Pendapatan Diterima Dimuka	C.39	Rp 22.221.569	Rp 592.855.373	-96,25
Beban Yang Masih Harus Dibayar	C.40	Rp -	Rp 836.890.800	-100,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.41	Rp -	Rp -	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		Rp 2.872.496.380	Rp 2.331.767.415	23,19
JUMLAH KEWAJIBAN		Rp 2.872.496.380	Rp 1.494.876.615	92,16
EKUITAS DANA	C.42	Rp 6.822.257.127.238	Rp 2.144.570.112.820	218,12
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		Rp 6.825.129.623.618	Rp 2.146.064.989.435	218,03

III. LAPORAN OPERASIONAL

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 31 DESEMBER 2016

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2017	31 Desember 2016
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	47.637.372.009	41.167.532.327
JUMLAH PENDAPATAN		47.637.372.009	41.167.532.327
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	80.661.681.578	76.021.916.004
Beban Persediaan	D.3	15.244.431.653	15.476.682.541
Beban Barang dan Jasa	D.4	392.050.969.497	343.000.213.746
Beban Pemeliharaan	D.5	15.775.340.892	18.076.932.036
Beban Perjalanan Dinas	D.6	61.228.673.878	43.899.426.164
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	60.593.467.337	48.302.054.059
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	127.787.333	554.930.639
Beban Lain-lain		-	-
JUMLAH BEBAN		625.682.352.168	545.332.155.189
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(578.044.980.159)	(504.164.622.862)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		468.115.496	152.080.749
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	1.818.855.157
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		955.744.192	2.260.990.511
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		546.569.525	417.794.216
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		877.290.163	176.421.887
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(577.167.689.996)	(503.988.200.975)
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNBPN		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(577.167.689.996)	(503.988.200.975)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 31 DESEMBER 2016

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Ekuitas Awal	E.1	2.144.570.112.820	2.056.779.326.775
Surplus/Defisit LO	E.2	(577.167.689.996)	(503.988.200.975)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar	E.3	-	-
Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	E.4	4.643.784.630.716	(7.595.329.630)
- Penyesuaian Nilai Aset	E.4.1	-	-
- Koreksi Nilai Persediaan	E.4.2	-	315.123.700
- Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.4.3	4.642.496.469.899	-
- Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.4.4	1.228.163.490	(8.359.191.825)
- Koreksi Lain-lain	E.4.5	59.997.327	448.738.495
Transaksi Antar Entitas	E.5	611.070.073.698	599.374.316.650
Ekuitas Akhir	E.6	6.822.257.127.238	2.144.570.112.820

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana Strategis*

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) berkewajiban memberikan layanan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi di bidang keuangan negara, khususnya bagi pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan guna mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian Keuangan yaitu **"Kami akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di abad ke-21"**. Salah satu kunci penting bagi pemenuhan tingkat kepuasan atas layanan yang diberikan kepada unit pengguna khususnya di lingkungan Kementerian Keuangan adalah komitmen yang kuat dari seluruh jajaran BPPK.

Dalam mendukung visi dan misi Kementerian Keuangan diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang handal dan berkualitas. Perubahan paradigma saat ini di mana sumber daya manusia adalah aset atau modal yang berharga dan perlu dikembangkan. BPPK seharusnya tidak hanya sekedar menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, akan tetapi harus juga melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang mengembangkan modal manusia atau *human capital* Kementerian Keuangan serta pengelola keuangan negara Republik Indonesia. BPPK diharapkan dapat mengembangkan SDM Kementerian Keuangan sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya dalam mendukung visi dan misi Kementerian Keuangan dan menghadapi tantangan yang ada. Hal ini perlu dikembangkan dalam rangka BPPK menuju *Corporate University*.

BPPK memiliki tugas untuk memastikan agar SDM Kementerian Keuangan memiliki kompetensi yang memadai dan handal sehingga dapat mendukung pencapaian kinerja dari seluruh mitra BPPK terutama di seluruh Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan.

Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor KEP-1162/PP/2015 tentang Rencana Strategis Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Tahun 2015-2019, visi dan misi BPPK adalah sebagai berikut :

Visi

Visi Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan adalah menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan terkemuka dalam menghasilkan pengelola keuangan negara berkelas dunia.

Misi

1. Membangun sistem pendidikan dan pelatihan SDM Keuangan Negara yang terintegrasi dalam mewujudkan *corporate university*.
2. Mengelola dan mengembangkan tenaga pengajar pendidikan dan pelatihan SDM Keuangan Negara yang berkualitas.
3. Mengembangkan sarana prasarana pembelajaran yang mutakhir dan efektif dalam mendukung pembelajaran.
4. Mengembangkan teknologi informasi pendidikan dan pelatihan SDM Keuangan Negara yang berkualitas.
5. Meningkatkan kerja sama dengan institusi pendidikan dan pelatihan terbaik.

Tugas, Fungsi, dan Peran

Berdasarkan Bab XIII Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, BPPK mempunyai tugas melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya, BPPK menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara;
2. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara; dan
4. Pelaksanaan administrasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam penyusunan Laporan Keuangan, entitas Pelaporan Pemerintah Pusat memiliki dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah pada Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

- 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
 16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat;
 17. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KMK.06/2013 tentang Modul Penyusutan;
 18. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat;
 19. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KM.6/2016 tentang Modul Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat;
 20. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-311/PB/2014 tentang Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar.

Laporan Keuangan ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang merupakan serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Laporan Keuangan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Tahun

2017 ini merupakan laporan gabungan dari seluruh jenjang struktural di bawah Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang meliputi wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Jumlah entitas akuntansi di lingkungan BPPK adalah 20 entitas. Rincian entitas tersebut tersaji sebagai berikut:

Tabel Rekapitulasi Jumlah Entitas UAPPA-E1

No	Kode	Uraian Wilayah	Jumlah Jenis Kewenangan								Jumlah Satker	
			KD		KD		DK		TP			
			M	TM	M	TM	M	TM	M	TM		
1	0199	Satker BPPK pusat	7									7
2	0200	Prop Jawa Barat			2							2
3	0300	Prop Jawa Tengah			1							1
4	0400	Prop DI Yogyakarta			1							1
5	0500	Prop Jawa Timur			1							1
6	0700	Prop Sumatra Utara			1							1
7	1100	Prop Sumatra Selatan			1							1
8	1600	Prop Kalimantan Timur			1							1
9	1700	Prop Sulawesi Utara			1							1
10	1900	Prop Sulawesi Selatan			1							1
11	2200	Prop. Bali			1							1
12	1351	Prop. Kalimantan Barat			1							1
13	0900	Prop. Riau			1							1
Jumlah			7		13							20

Keterangan:

KP: Kantor Pusat

KD: Kantor Daerah

DK: Dekonsentrasi

TP: Tugas Pembantuan

M: Menyampaikan

TM: Tidak Menyampaikan

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran atau penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2017 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi,

aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Keuangan. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus, pengakuan pendapatan-LO pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan diatur dalam Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-17/MK.1/2015 tentang Petunjuk Teknis Kebijakan Akuntansi Pendapatan Berbasis AkruaL Lingkup Kementerian Keuangan BA 015, sebagai

berikut:

- Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
- Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.
- Semua pendapatan-LO di Kementerian Keuangan yang belum diatur dalam Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-17/MK.1/2015 tentang Petunjuk Teknis Kebijakan Akuntansi Pendapatan Berbasis AkruaL Lingkup Kementerian Keuangan BA 015, mengikuti kebijakan akuntansi pendapatan-LO secara umum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari RKUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan

andal.

- Piutang disajikan di neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihan piutang adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila

diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari

suatu aset tetap.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.
- Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:
 - Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
 - Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Sesuatu diakui sebagai Aset Tak Berwujud diakui jika dan hanya jika:

- Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
- Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
- Untuk keseragaman penyajian dan pengungkapan ATB di seluruh satuan kerja di Pemerintah Pusat, tata cara penyajian dan pengungkapan ATB (sesuai Bultek SAP No.17) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 251/PMK.06/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

Kewajiban

(7) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(8) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

(9) Amortisasi Aset Tak Berwujud

- Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.06/2015, amortisasi dilakukan terhadap Aset Tak Berwujud yang memiliki Masa Manfaat terbatas, antara lain meliputi:
 - a. Perangkat Lunak (*Software*) Komputer;
 - b. Lisensi;
 - c. Waralaba (*Franchise*);
 - d. Hak Cipta (*Copyright*); dan
 - e. Hak Paten.
- Amortisasi tidak dilakukan terhadap:
 - a. Aset Tak Berwujud yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Hak Cipta (*Copyright*) dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang pendelegasian kewenangan, untuk dilakukan penghapusannya; dan
 - b. Aset Tak Berwujud dalam kondisi usang dan/ atau rusak berat yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendelegasian kewenangan, untuk dilakukan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusan.
- Nilai yang dapat dilakukan Amortisasi pertama kali merupakan nilai buku per 30 September 2016 untuk Aset Tak Berwujud yang diperoleh sampai dengan 30 September 2016. Untuk Aset Tak Berwujud yang diperoleh setelah tanggal 30 September 2016, nilai yang dapat diamortisasi merupakan

nilai perolehan. Penentuan nilai yang dapat diamortisasi dilakukan untuk setiap unit Aset Tak Berwujud tanpa adanya nilai residu.

- Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus dengan mengalokasikan nilai yang dapat dilakukan Amortisasi atas Aset Tak Berwujud secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Penerapan atas Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat berdasarkan SAP Berbasis Akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2016.
- Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015, masa manfaat Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

Kode Barang					Uraian	Tahun
8	01	01	01	001	Software Komputer	4
8	01	01	01	002	Lisensi	10
8	01	01	01	003	Franchise	5
8	01	01	01	004	Hak Cipta Atas Ciptaan Gol.I	70
8	01	01	01	005	Hak Paten Sederhana	10
8	01	01	01	008	Hak Cipta Atas Ciptaan Gol.II	50
8	01	01	01	009	Hak Cipta Karya Seni Terapan	25
8	01	01	01	010	Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan	50
8	01	01	01	011	Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
8	01	01	01	012	Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran	20
8	01	01	01	013	Paten Biasa	20
8	01	01	01	014	Merek	10
8	01	01	01	015	Desain Industri	10
8	01	01	01	016	Rahasia Dagang	10
8	01	01	01	017	Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
8	01	01	01	018	Perlindungan Varietas Tanaman Musiman	20
8	01	01	01	019	Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25

*Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis Akrua
Pertama Kali*

(10) Implementasi Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan, antara lain: 1) pos-pos ekuitas dana pada neraca per 30 September 2016 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual; dan 2) keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi karena penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, BPPK telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Berikut adalah anggaran pendapatan dan belanja BPPK pada TA 2017 :

Uraian	2017	
	Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Setelah Direvisi (Rp)
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	19.404.000.000	39.795.132.000
Pendapatan Lain-lain	-	-
Jumlah Pendapatan	19.404.000.000	39.795.132.000
Belanja		
Belanja Pegawai	74.504.490.000	82.314.232.000
Belanja Barang	582.031.139.000	556.867.469.000
Belanja Modal	77.621.938.000	90.373.263.000
Jumlah Belanja	734.157.567.000	729.554.964.000

Perubahan atau revisi anggaran per uraian pada BPPK adalah sebagai berikut:

Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	2017	
		Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Setelah Direvisi (Rp)
1739	Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Bagi Unit Kerja di Lingkungan BPPK	102.609.145.000	93.172.799.000
1738	Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma Keuangan	115.992.000.000	136.383.132.000
1736	Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Perpajakan	70.680.158.000	70.680.158.000
1733	Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Kepabeanan dan Cukai	27.815.805.000	27.703.326.000
1735	Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Selain Anggaran, Perbendaharaan, Perpajakan, Kepabeanan, Cukai, Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan	25.694.501.000	24.203.960.000
1737	Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan dan Manajemen Serta Pendidikan Pascasarjana Bagi Pegawai Kementerian Keuangan	229.056.475.000	189.837.142.000
1734	Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan	19.057.709.000	19.142.302.000
1732	Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Anggaran dan Perbendaharaan	32.971.545.000	32.971.545.000
1731	Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Negara di Daerah	110.280.229.000	135.460.600.000
	JUMLAH	734.157.567.000	729.554.964.000

Realisasi

Pendapatan

Rp49.684.081.117

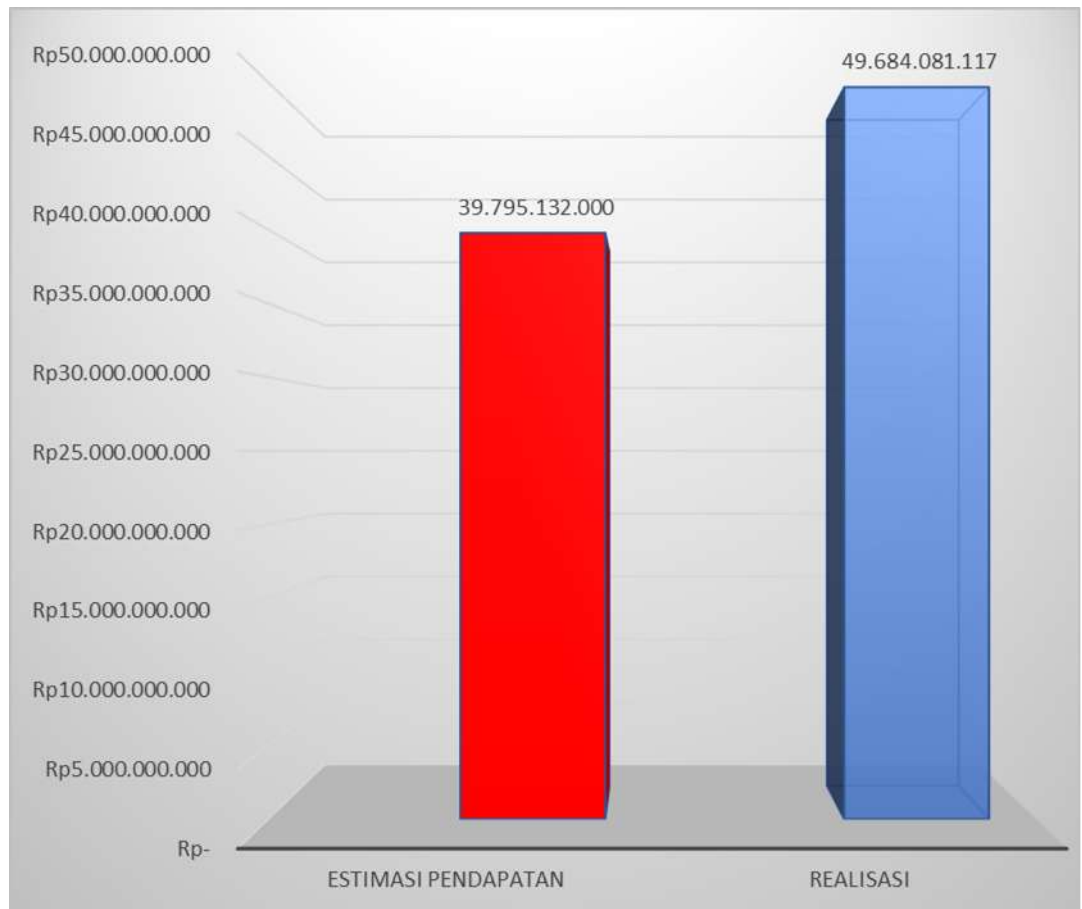
B.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp49.684.081.117 atau mencapai 124,85 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp39.795.132.000. Pendapatan yang ada di lingkungan BPPK terdiri dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya dan Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU). Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan TA 2017

MAP	Uraian Pendapatan	Estimasi	Realisasi	%
	PENDAPATAN PNBP LAINNYA	1.407.000.000	4.585.621.055	325,91
423119	Pendapatan Penjualan Lainnya	-	11.180.000	-
423122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	175.134.000	-
423129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	50.000.000	490.753.999	981,51
423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	152.000.000	308.401.273	202,90
423216	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Masing-masing Kementerian dan Pendapatan DJBC	1.005.000.000	1.317.000.000	131,04
423221	Pendapatan Jasa dari Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	-	1.920.030	-
423519	Pendapatan Pendidikan Lainnya	-	220.400.000	-
423752	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	162.855.069	-
423921	Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara	-	61.285.000	-
423951	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	56.955.457	-
423952	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	184.029.416	-
423953	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-	1.401.781.262	-
423991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	-	14.032.599	-
423999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	200.000.000	179.892.950	89,95
	PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM	38.388.132.000	45.098.460.062	117,48
424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	35.391.132.000	35.849.835.295	101,30
424113	Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi	2.997.000.000	-	-
424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	-	755.725.756	-
424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	-	2.118.161.750	-
424313	Pendapatan Hasil Kerja Sama Pemerintah Daerah	-	2.434.150.000	-
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	-	3.940.587.261	-
	JUMLAH	39.795.132.000	49.684.081.117	124,85

Komposisi estimasi pendapatan dan realisasi pendapatan dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Apabila dibandingkan dengan realisasi Pendapatan BPPK per 31 Desember 2016, realisasi PNPB lainnya periode 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar Rp1.156.932.273 atau 20,19 persen, sedangkan realisasi Pendapatan BLU mengalami peningkatan sebesar Rp8.205.285.900 atau 22,24 persen. Penurunan PNPB lainnya terutama disebabkan Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan, dan Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi sesuai dengan Tugas dan Fungsi Masing-masing Kementerian Negara/Lembaga. Sedangkan peningkatan pendapatan BLU terutama disebabkan meningkatnya Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan, Pendapatan Hasil Kerjasama Lembaga/Badan usaha, Pendapatan Hasil Kerjasama Pemerintah Daerah pada satuan kerja BLU PKN STAN.

Dengan demikian, total kenaikan realisasi Pendapatan BPPK per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp7.059.533.627 atau 16,15 persen dibandingkan dengan total realisasi Pendapatan BPPK periode 31 Desember 2016.

**Perbandingan Realisasi Pendapatan
31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016**

NO	URAIAN PENDAPATAN	30 September 2017	31 Desember 2016	Kenaikan (Penurunan)	
				(Rp)	%
	PENDAPATAN PNBP LAINNYA	4.585.621.055	5.731.373.328	(1.156.932.273)	(20,19)
423119	Pendapatan Penjualan Lainnya	11.180.000	-	11.180.000	-
423122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	175.134.000	73.469.500	101.664.500	138,38
423129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	490.753.999	78.611.249	412.142.750	524,28
423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	308.401.273	820.188.808	(511.787.535)	(62,40)
423216	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Masing-masing Kementerian Negara/Lembaga	1.317.000.000	1.844.500.000	(527.500.000)	(28,60)
423221	Pendapatan Jasa dari Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	1.920.030	2.564	1.917.466	74.784,17
423519	Pendapatan Pendidikan Lainnya	220.400.000	424.800.000	(204.400.000)	(48,12)
423752	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	162.855.069	76.836.947	86.018.122	111,95
423921	Pendapatan Pelunasan Piutang Non Bendahara	61.285.000	31.250.333	30.034.667	96,11
423951	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	56.955.457	112.090.777	(55.135.320)	(49,19)
423952	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	184.029.416	1.614.449.701	(1.430.420.285)	(88,60)
423953	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	1.401.781.262	222.080.864	1.179.700.398	531,20
423991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	14.032.599	20.267.469	(6.234.870)	(30,76)
423999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	179.892.950	412.825.116	(232.932.166)	(56,42)
	PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM	45.098.460.062	36.893.174.162	8.205.285.900	22,24
424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	35.849.835.295	32.763.355.000	3.086.480.295	9,42
424113	Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi	-	424.757	(424.757)	(100,00)
424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	755.725.756	-	755.725.756	-
424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	2.118.161.750	-	2.118.161.750	-
424313	Pendapatan Hasil Kerja Sama Pemerintah Daerah	2.434.150.000	-	2.434.150.000	-
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	3.940.587.261	4.129.394.405	(188.807.144)	(4,57)
	JUMLAH	49.684.081.117	42.624.547.490	7.059.533.627	16,56

Adapun rincian estimasi dan realisasi Pendapatan PNBK Lainnya per Satuan Kerja di lingkungan BPPK TA 2017 adalah sebagai berikut:

**Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan PNBK Lainnya
per Satuan Kerja di Lingkungan BPPK TA 2017**

No	Satuan Kerja	Estimasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	BPPK Pusat	36.000.000	154.664.828	429,62
2	Pusdiklat PSDM	-	191.825.659	0,00
3	Pusdiklat KNPK	-	24.315.360	0,00
4	PKN STAN	38.588.132.000	45.555.742.826	118,06
5	Pusdiklat Pajak	-	1.451.087.005	0,00
6	Pusdiklat BC	1.060.000.000	1.510.779.677	142,53
7	Pusdiklat KU	-	97.629.010	0,00
8	Pusdiklat AP	13.000.000	22.785.313	175,27
9	BD Pim Magelang	18.000.000	29.086.950	161,59
10	BKD Medan	-	56.688.124	0,00
11	BKD Palembang	41.000.000	61.124.100	149,08
12	BKD Yogyakarta	30.000.000	38.386.774	127,96
13	BKD Malang	-	36.082.001	0,00
14	BKD Balikpapan	9.000.000	172.549.511	1917,22
15	BKD Makassar	-	19.595.137	0,00
16	BKD Cimahi	-	28.772.705	0,00
17	BKD Manado	-	78.994.912	0,00
18	BKD Pontianak	-	134.793.547	0,00
19	BKD Pekanbaru	-	5.519.200	0,00
20	BKD Denpasar	-	13.658.478	0,00
	TOTAL	39.795.132.000	49.684.081.117	124,85

Realisasi Belanja
Rp650.125.131.940

B.2. BELANJA

Realisasi Belanja pada 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp650.125.131.940 atau 89,11% dari anggaran Belanja sebesar Rp729.554.964.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

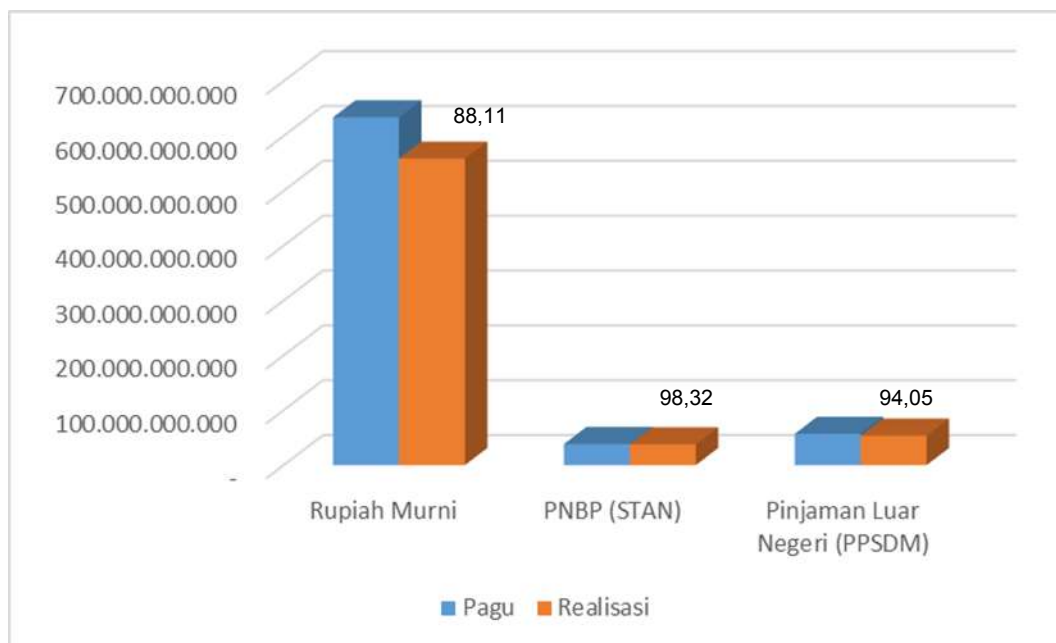
Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja TA 2017

Kode Jenis Belanja	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
51	Belanja Pegawai	82.314.232.000	78.738.838.629	95,66
52	Belanja Barang	556.867.469.000	488.677.109.905	87,75
53	Belanja Modal	90.373.263.000	85.648.411.521	94,77
	Total Belanja Bruto	729.554.964.000	653.064.360.055	89,52
	Pengembalian Belanja		(2.939.228.115)	
	Belanja Netto	729.554.964.000	650.125.131.940	89,11

**Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja per Sumber Dana
TA 2017**

No	Sumber Dana	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Rupiah Murni	634.045.742.000	558.662.379.477	88,11
2	PNBP (PKN STAN)	38.388.132.000	37.743.018.004	98,32
3	Pinjaman Luar Negeri (PPSDM)	57.121.090.000	53.719.734.459	94,05
	TOTAL	729.554.964.000	650.125.131.940	89,11

Komposisi pagu anggaran dan realisasi belanja 31 Desember 2017 dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

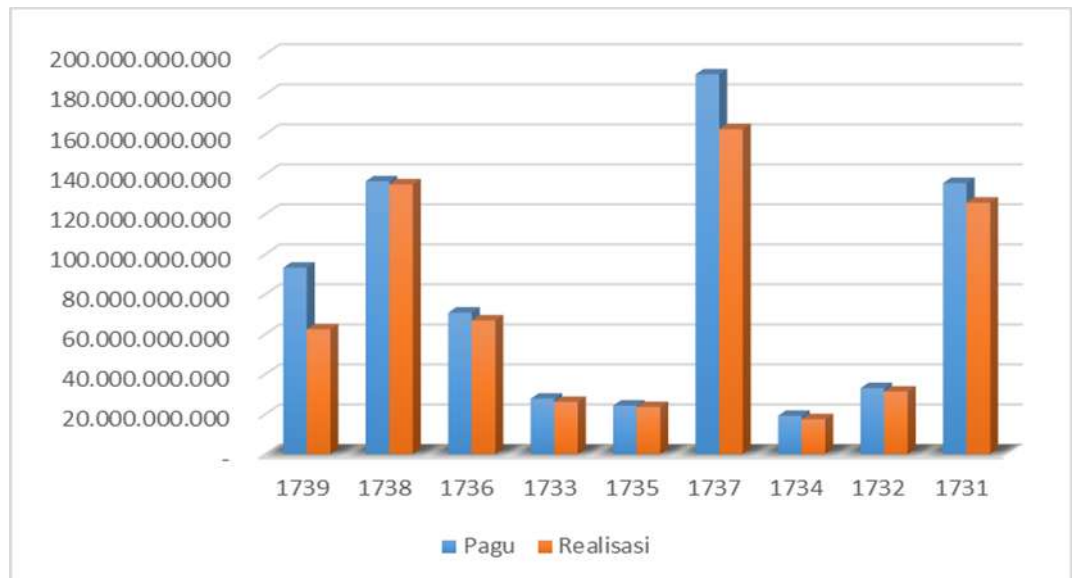


Adapun realisasi belanja BPPK berdasarkan jenis kegiatan untuk TA 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Berdasarkan Jenis Kegiatan TA 2017

Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1739	Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Bagi Unit Kerja di Lingkungan BPPK	93.172.799.000	62.325.496.743	66,89
1738	Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma Keuangan	136.383.132.000	134.824.317.652	98,86
1736	Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Perpajakan	70.680.158.000	66.775.822.510	94,48
1733	Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Kepabeanaan dan Cukai	27.703.326.000	26.038.062.319	93,99
1735	Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Selain Anggaran, Perbendaharaan, Perpajakan, Kepabeanaan, Cukai, Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan	24.203.960.000	23.516.431.556	97,16
1737	Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan dan Manajemen Serta Pendidikan Pascasarjana Bagi Pegawai Kementerian Keuangan	189.837.142.000	162.367.870.127	85,53
1734	Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan	19.142.302.000	17.393.033.189	90,86
1732	Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Anggaran dan Perbendaharaan	32.971.545.000	31.222.873.188	94,70
1731	Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Negara di Daerah	135.460.600.000	125.661.224.656	92,77
	JUMLAH	729.554.964.000	650.125.131.940	89,11

Berikut adalah grafik komposisi pagu anggaran dan realisasi anggaran per Jenis Kegiatan BPPK TA 2017:



Adapun nilai pagu dan realisasi anggaran per Satuan Kerja di lingkungan BPPK adalah:

Anggaran dan Realisasi Belanja Per Satuan Kerja TA 2017

No	Unit/Satker	Pagu (Rp)	Realisasi	
			Rp	%
1	BPPK Pusat	93.172.799.000	62.325.496.743	66,89
2	Pusdiklat PSDM	173.410.670.000	146.485.369.447	84,47
3	Pusdiklat KNPK	19.142.302.000	17.393.033.189	90,86
4	PKN STAN	136.383.132.000	134.824.317.652	98,86
5	Pusdiklat Pajak	70.680.158.000	66.775.822.510	94,48
6	Pusdiklat BC	27.703.326.000	26.038.062.319	93,99
7	Pusdiklat KU	24.203.960.000	23.516.431.556	97,16
8	Pusdiklat AP	32.971.545.000	31.222.873.188	94,70
9	BD Pim Magelang	16.426.472.000	15.882.500.680	96,69
10	BDK Medan	13.481.296.000	11.511.359.121	85,39
11	BDK Palembang	10.520.336.000	9.299.704.598	88,40
12	BDK Yogyakarta	15.171.206.000	13.193.668.289	86,97
13	BDK Malang	14.748.899.000	14.246.944.103	96,60
14	BDK Balikpapan	12.007.728.000	11.183.044.541	93,13
15	BDK Makassar	12.904.431.000	12.606.800.674	97,69
16	BDK Cimahi	13.785.254.000	13.568.307.946	98,43
17	BDK Manado	8.574.609.000	8.452.287.459	98,57
18	BDK Pontianak	12.635.964.000	11.679.755.988	92,43
19	BDK Pekanbaru	13.287.579.000	11.894.846.745	89,52
20	BDK Denpasar	8.343.298.000	8.024.505.192	96,18
	Total Belanja	729.554.964.000	650.125.131.940	89,11

Dibandingkan dengan 31 Desember 2016, realisasi Belanja 31 Desember 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp 26.200.787.874 atau 4,20%. Secara umum kenaikan ini antara lain disebabkan oleh:

1. Kenaikan anggaran belanja pegawai;
2. Kenaikan anggaran belanja barang yang digunakan untuk menunjang Tugas Pokok dan Fungsi, diantaranya penyelenggaraan diklat, dukungan kediklatan, penyelenggaraan beasiswa, program Diploma PKN STAN, *corporate university*, kajian akademis, dan *executive training*.

Sedangkan untuk belanja modal mengalami penurunan anggaran dan realisasi yang disebabkan pembangunan gedung kantor BDK Pontianak dan gedung asrama Pusdiklat Pajak pada tahun 2016 yang saat ini sudah selesai dan masuk dalam tahap pengisian peralatan gedung.

Secara umum, realisasi anggaran BPPK dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi dan penghematan yang dilakukan Kementerian Keuangan selama periode tahun anggaran 2017 sehingga terdapat efisiensi anggaran yang berasal dari kegiatan-kegiatan yang terpengaruh dampak penghematan. Kebijakan penghematan tersebut berlaku untuk belanja barang, diantaranya : perjalanan dinas dan paket meeting, honorarium tim pelaksana kegiatan, belanja operasional perkantoran, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja barang operasional dan non operasional lainnya.

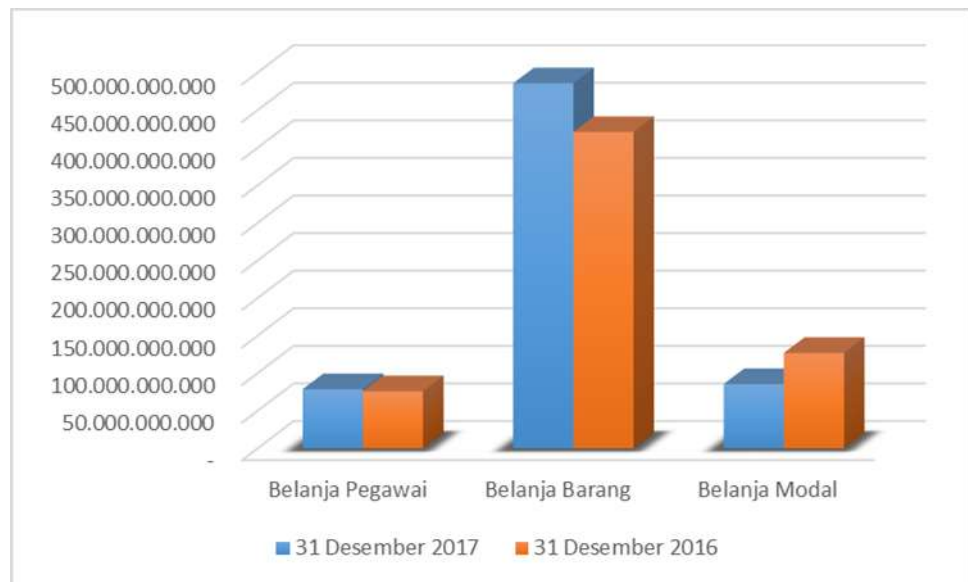
Adapun kendala/permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan anggaran 2017 antara lain :

1. Jumlah peserta diklat tidak sesuai dengan yang telah direncanakan;
2. Terdapat beberapa kegiatan yang dibatalkan atau ditunda pelaksanaannya baik yang berasal dari kegiatan kediklatan dan/atau seminar maupun kegiatan non kediklatan;
3. Adanya penghematan anggaran untuk beberapa kegiatan;
4. Adanya efisiensi dari anggaran kediklatan terutama dari diklat latsar, selain itu juga efisiensi yang berasal dari sisa hasil lelang pengadaan terkait kediklatan;
5. Adanya efisiensi atau sisa hasil lelang pengadaan.

Perbandingan Realisasi Belanja BPPK menurut Jenis Belanja antara 31 Desember 2017 dengan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Kode Jenis Belanja	Jenis Belanja	Realisasi Belanja (Rp)		Naik (Turun)	
		31 Desember 2017	31 Desember 2016	Rp	%
51	Belanja Pegawai	78.720.372.595	76.010.361.486	2.710.011.109	3,57
52	Belanja Barang	485.787.347.824	420.941.035.074	64.846.312.750	15,41
53	Belanja Modal	85.617.411.521	126.972.947.506	(41.355.535.985)	-32,57
	TOTAL	650.125.131.940	623.924.344.066	26.200.787.874	4,20



Belanja Pegawai
Rp78.720.372.595

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp78.720.372.595 dan Rp76.010.361.486. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi belanja pegawai 31 Desember 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp2.710.011.109 atau 3,57% jika dibandingkan dengan 31 Desember 2016.

Kenaikan ini merupakan kenaikan wajar yang disebabkan adanya kenaikan pangkat/golongan pegawai, adanya kenaikan tunjangan suami/istri, dan uang makan PNS. Sedangkan jumlah pegawai BPPK mengalami penurunan yang disebabkan adanya perpindahan pegawai BPPK ke instansi lain (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian) dan pegawai pensiun.

Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Pegawai 31 Desember 2017

Akun	Belanja Pegawai	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	81.205.949.000	78.236.018.629	96,34
5122	Belanja Lembur	1.108.283.000	502.820.000	45,37
	Jumlah Bruto	82.314.232.000	78.738.838.629	95,66
	Pengembalian Belanja		(18.466.034)	
	Jumlah Neto	82.314.232.000	78.720.372.595	95,63

Perbandingan Belanja Pegawai 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Akun	Belanja Pegawai	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Naik (Turun)	% Naik (Turun)
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	78.236.018.629	75.498.671.004	2.737.347.625	3,63%
5122	Belanja Lembur	502.820.000	542.061.800	(39.241.800)	-7,24%
	Jumlah Bruto	78.738.838.629	76.040.732.804	2.698.105.825	3,55%
	Pengembalian Belanja	(18.466.034)	(30.371.318)	11.905.284	-39,20%
	Jumlah Neto	78.720.372.595	76.010.361.486	2.710.011.109	3,57%

Belanja Barang
Rp 485.787.347.824

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp485.787.347.824 dan Rp420.941.035.074.

Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp64.846.312.750 atau 15,41% dibandingkan dengan 31 Desember 2016. Hal ini disebabkan antara lain sebagai berikut :

1. Adanya kenaikan belanja jasa yang cukup signifikan terutama pada belanja langganan listrik, belanja sewa, belanja jasa profesi, dan belanja jasa lainnya. Belanja sewa lingkup BPPK digunakan untuk sewa kendaraan observasi lapangan (PKL), sewa kendaraan operasional, sewa perlengkapan dan ruangan. Belanja jasa profesi digunakan untuk honorarium pengajar, dan belanja jasa lainnya yang sebagian besar digunakan untuk keperluan laundry peserta diklat;
2. Belanja barang non operasional yang sebagian besar digunakan untuk

output layanan kediklatan, mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 periode yang sama terutama untuk pelaksanaan diklat latsar.

3. Belanja Perjalanan dalam negeri mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini disebabkan meningkatnya realisasi anggaran kediklatan baik diklat-diklat rutin maupun diklat latsar. Belanja perjalanan dinas dalam negeri lingkup BPPK sebagian besar digunakan untuk perjalanan dinas peserta diklat.
4. Belanja perjalanan luar negeri mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini disebabkan meningkatnya anggaran kegiatan *executive training* bagi pimpinan di lingkungan Kementerian Keuangan.
5. Belanja barang BLU juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang disebabkan meningkatnya anggaran belanja barang BLU seiring bertambahnya jumlah mahasiswa PKN STAN.

Adapun kendala penyerapan belanja barang sampai selama pelaksanaan anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah peserta diklat tidak sesuai dengan yang telah direncanakan;
2. Terdapat beberapa kegiatan yang dibatalkan atau ditunda pelaksanaannya baik yang berasal dari kegiatan kediklatan dan/atau seminar maupun kegiatan non kediklatan;
3. Adanya penghematan anggaran untuk beberapa kegiatan;
4. Adanya efisiensi dari anggaran kediklatan terutama dari diklat latsar, selain itu juga efisiensi yang berasal dari sisa hasil lelang pengadaan terkait kediklatan;
5. Adanya efisiensi yang berasal dari anggaran kegiatan *corporate university*.

Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Barang 31 Desember 2017

Akun	Belanja Barang	Anggaran	Realisasi	%
5211	Belanja Barang Operasional	32.081.589.000	31.577.371.906	98,43
5212	Belanja Barang Non Operasional	288.362.385.000	261.189.355.257	90,58
5218	Belanja Barang Persediaan	17.563.161.000	15.063.918.980	85,77
5221	Belanja Jasa	88.120.299.000	75.616.770.359	85,81
5231	Belanja Pemeliharaan	13.637.875.000	13.509.992.235	99,06
5241	Belanja Perjalanan dalam negeri	73.307.698.000	52.716.500.219	71,91
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri	11.362.270.000	6.850.356.485	60,29
5251	Belanja Barang BLU	32.442.192.000	32.152.844.464	99,11
	Jumlah Bruto	556.877.469.000	488.677.109.905	87,75
	Pengembalian Belanja		(2.889.762.081)	
	Jumlah Neto	556.877.469.000	485.787.347.824	87,23

Perbandingan Belanja Barang 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Akun	Belanja Barang	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Naik (Turun)	% Naik (Turun)
5211	Belanja Barang Operasional	31.577.371.906	29.591.674.054	1.985.697.852	6,71%
5212	Belanja Barang Non Operasional	261.189.355.257	252.841.082.960	8.348.272.297	3,30%
5218	Belanja Barang Persediaan	15.063.918.980	16.689.533.721	(1.625.614.741)	-9,74%
5221	Belanja Jasa	75.616.770.359	42.550.720.725	33.066.049.634	77,71%
5231	Belanja Pemeliharaan	13.509.992.235	17.103.803.908	(3.593.811.673)	-21,01%
5241	Belanja Perjalanan dalam negeri	52.716.500.219	40.593.223.756	12.123.276.463	29,87%
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri	6.850.356.485	1.791.441.862	5.058.914.623	282,39%
5251	Belanja Barang BLU	32.152.844.464	20.855.435.230	11.297.409.234	54,17%
	Jumlah Bruto	488.677.109.905	422.016.916.216	66.660.193.689	15,80%
	Pengembalian Belanja	(2.889.762.081)	(1.075.881.142)	(1.813.880.939)	168,59%
	Jumlah Neto	485.787.347.824	420.941.035.074	64.846.312.750	15,41%

Belanja Modal

Rp 85.617.411.521

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp85.617.411.521 dan Rp126.972.947.506. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar Rp41.355.535.985 atau -32,57% dibandingkan 31 Desember 2016. Berikut adalah beberapa penjelasan terkait belanja modal :

1. Berkurangnya anggaran belanja modal terutama untuk pembangunan Gedung dan Bangunan. Anggaran pembangunan gedung dan bangunan terbesar tahun lalu berada di Pusdiklat Pajak untuk pembangunan asrama diklat dan BDK Pontianak untuk pembangunan gedung Balai Diklat Keuangan Pontianak yang telah selesai pada akhir tahun 2016 sehingga realisasi belanja modal gedung dan bangunan 31 Desember 2017 ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya;
2. Berkurangnya belanja modal lainnya dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini disebabkan pada tahun 2016 terdapat pengadaan buku-buku perpustakaan bagi seluruh satuan kerja di lingkungan BPPK.
3. Belanja modal peralatan dan mesin mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya karena adanya pengadaan perlengkapan dan peralatan untuk mengisi gedung kantor dan asrama diklat baru terutama pada Pusdiklat Pajak dan BDK Pontianak yang cukup signifikan.

Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Modal 31 Desember 2017

Akun	Belanja Modal	Anggaran	Realisasi	%
5311	Belanja Modal Tanah	2.000.000	1.854.000	92,70
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	65.133.957.000	61.531.044.908	94,47
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	17.808.919.000	17.246.278.494	96,84
5341	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	446.232.000	384.577.600	86,18
5361	Belanja Modal Lainnya	1.036.215.000	894.482.979	86,32
5371	Belanja Modal BLU	5.945.940.000	5.590.173.540	94,02
	Jumlah Bruto	90.373.263.000	85.648.411.521	94,77
	Pengembalian Belanja		(31.000.000)	
	Jumlah Neto	90.373.263.000	85.617.411.521	94,74

**Perbandingan Realisasi Belanja Modal
31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016**

Akun	Belanja Modal	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Naik (Turun)	% Naik (Turun)
5311	Belanja Modal Tanah	1.854.000	-	1.854.000	0,00%
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	61.531.044.908	19.339.449.133	42.191.595.775	218,16%
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	17.246.278.494	103.591.564.746	(86.345.286.252)	-83,35%
5341	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	384.577.600	258.844.150	125.733.450	48,57%
5361	Belanja Modal Fisik Lainnya	894.482.979	3.783.715.477	(2.889.232.498)	-76,36%
5371	Belanja Modal BLU	5.590.173.540	-	5.590.173.540	0,00%
	Jumlah Bruto	85.648.411.521	126.973.573.506	(41.325.161.985)	-32,55%
	Pengembalian Belanja	(31.000.000)	(626.000)	(30.374.000)	4852,08%
	Jumlah Neto	85.617.411.521	126.972.947.506	(41.355.535.985)	-32,57%

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp1.854.000 dan Rp 0. Biaya ini merupakan biaya untuk pembuatan surat ukur tanah pada tanah di Cirebon.

**Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah
31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016**

Akun	Belanja Modal	31 Desember 2017	31 Desember 2016	%
531111	Belanja Modal Tanah	-	-	0,00
531115	Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	-	-	0,00
531116	Belanja Modal Biaya Pengukuran Tanah	1.854.000	-	0,00
	Jumlah Bruto	1.854.000	-	0,00
	Pengembalian Belanja	-	-	0,00
	Jumlah Neto	1.854.000	-	0,00

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp61.531.044.908 dan per 31 Desember 2016 sebesar Rp19.339.449.133, mengalami peningkatan sebesar Rp42.191.595.775 atau 218,16 persen bila dibandingkan dengan 31 Desember 2016. Jika dibandingkan dengan pagu anggaran tahun sebelumnya, anggaran peralatan dan mesin mengalami peningkatan yang cukup signifikan karena adanya kebutuhan untuk mengisi peralatan dan perlengkapan gedung kantor dan asrama baru di BDK Pontianak dan Pusdiklat Pajak, pengadaan peralatan pendukung IT dan komunikasi, serta adanya pengadaan *Smart Classroom*.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Akun	Belanja Modal	31 Desember 2017	31 Desember 2016	%
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	61.511.503.381	19.293.540.763	218,82
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	19.541.527	45.908.370	-57,43
	Jumlah Bruto	61.531.044.908	19.339.449.133	218,16
	Pengembalian Belanja	31.000.000	-	0,00
	Jumlah Neto	61.500.044.908	19.339.449.133	218,00

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp17.246.278.494 dan Rp103.590.988.746. Realisasi belanja modal gedung dan bangunan lebih rendah jika dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan pada periode yang sama tahun sebelumnya terdapat pembangunan asrama di Pusdiklat Pajak dan pembangunan gedung kantor BDK Pontianak yang telah selesai pada akhir tahun 2016.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Akun	Belanja Modal	31 Desember 2017	31 Desember 2016	%
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.651.467.661	96.816.720.095	-92,10
533113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan	-	8.600.000	
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	9.594.810.833	6.766.244.651	41,80
	Jumlah Bruto	17.246.278.494	103.591.564.746	-83,35
	Pengembalian Belanja	-	(576.000)	-100,00
	Jumlah Neto	17.246.278.494	103.590.988.746	-83,35

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp384.577.600 dan Rp258.844.150. Realisasi 31 Desember 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp125.733.450 atau 48,57 persen dibandingkan 31 Desember 2016. Hal ini disebabkan adanya pengadaan jaringan kabel *fiber optic* dan perbaikan jaringan dan instalasi genset pada BDK Balikpapan.

Perbandingan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Akun	Belanja Modal	31 Desember 2017	31 Desember 2016	%
534121	Belanja Modal Irigasi	-	-	-
534131	Belanja Modal Jaringan	384.577.600	-	-
534151	Belanja Penambahan Nilai Irigasi	-	-	-
534161	Belanja Penambahan Nilai Jaringan	-	258.844.150	(100,00)
	Jumlah Bruto	384.577.600	258.844.150	48,57
	Pengembalian Belanja		-	-
	Jumlah Neto	384.577.600	258.844.150	48,57

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 894.482.979 dan Rp 3.783.715.477. Realisasi 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar Rp2.889.232.498 atau -76,36 persen dibandingkan 31 Desember 2016. Hal ini disebabkan tahun sebelumnya terdapat belanja modal fisik lainnya yang digunakan untuk pengadaan buku-buku perpustakaan bagi seluruh satuan kerja di lingkungan BPPK.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Akun	Belanja Modal	31 Desember 2017	31 Desember 2016	%
536111	Belanja Modal Lainnya	894.482.979	3.783.715.477	-76,36
	Jumlah Bruto	894.482.979	3.783.715.477	-76,36
	Pengembalian Belanja	-	(50.000)	-100,00
	Jumlah Neto	894.482.979	3.783.665.477	-76,36

B.6 Belanja Badan Layanan Umum

Belanja Badan Layanan Umum di BPPK hanya dimiliki oleh PKN STAN. Realisasi Belanja BLU 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp37.743.018.004 dan Rp20.855.435.230. Realisasi Belanja Badan Layanan Umum periode 31 Desember 2017 mengalami kenaikan sebesar 80,97 persen dibandingkan 31 Desember 2016. Hal ini disebabkan kenaikan beberapa belanja, di antaranya belanja gaji dan tunjangan, belanja barang, belanja jasa, dan belanja perjalanan yang digunakan untuk menunjang layanan atau kerja sama BLU PKN STAN. Selain itu, tahun 2017 terdapat belanja modal peralatan dan mesin BLU dan belanja modal gedung bangunan BLU.

Perbandingan Realisasi Belanja BLU 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Akun	Uraian Belanja	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)	%
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.956.793.704	65.211.000	2.900,71
525112	Belanja Barang	10.572.003.443	6.304.640.157	67,69
525113	Belanja Jasa	14.385.436.462	9.088.327.013	58,28
525114	Belanja Pemeliharaan	1.464.411.529	-	-
525115	Belanja Perjalanan	3.429.556.667	2.521.456.720	36,01
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	344.642.659	2.875.800.340	(88,02)
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU	4.654.456.055	-	-
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLU	935.717.485	-	-
	Jumlah Bruto	37.743.018.004	20.855.435.230	80,97
	Pengembalian Belanja	-	-	-
	Jumlah Neto	37.743.018.004	20.855.435.230	80,97

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di Bendahara
Pengeluaran Rp0*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp21.275.000 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Sisa saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per Satuan Kerja di lingkungan BPPK adalah:

**Rincian Perbandingan Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
Per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016**

Satuan Kerja	31 Desember 2017	31 Desember 2016
BDK Pontianak	-	7.937.000
BDK Balikpapan	-	13.338.000
Jumlah	-	21.275.000

*Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp10.000.000*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar masing-masing Rp10.000.000 dan Rp0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

**Rincian Perbandingan Rincian Kas di Bendahara Penerimaan
Per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016**

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Uang Tunai	-	-
Rekening Bank	10.000.000	-
Jumlah	10.000.000	-

Nilai Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp10.000.000 merupakan nilai PNPB Sewa Kelas pada Pusdiklat Bea dan Cukai yang belum disetorkan ke rekening negara per tanggal 31 Desember 2017.

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

*Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp1.865.808.583*

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp1.865.808.583 dan Rp23.858.115.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya, dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Sebagian besar saldo tersebut terdiri atas Utang Pihak Ketiga Lainnya dan Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

**Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas
Per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016**

Satuan Kerja	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Pusdiklat Bea dan Cukai	Rp 176.000	Rp -
PKN STAN	Rp 1.865.632.583	Rp 16.776.915
BDK Pekanbaru	Rp -	Rp 7.081.200
Jumlah	Rp 1.865.808.583	Rp 23.858.115

Penjelasan mengenai Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Satuan Kerja	Penjelasan	Nilai (Rp)	
Pusdiklat Bea dan Cukai	Biaya <i>payroll</i> tunjangan kinerja pegawai di rekening bendahara pengeluaran yang belum di <i>autodebet</i> oleh Bank Mandiri per tanggal 31 Desember 2017	176.000	
PKN STAN	PT Rogate Ehipanias Jaya	Pembayaran penataan lingkungan kolam kalimongso	147.812.852
	CV Surya Putra Pratama	Pengadaan AC standing gedung G	156.723.350
	PT Rafindo Jaya Abadi	Pembayaran penataan ruang gedung B	164.840.900
	CV Sentana Agung	Pembayaran pengadaan karpet Sajadah dan pemasangan karpet mushola	15.870.714
	PT Citaraga Mandiri	Pembayaran Penggantian Lampu PJU	61.278.000
	PT. Mitra Global Informatika	Pengadaan Soundsystem Outdoor	167.450.000
	CV Grafikana Lyssa	Pengadaan Peralatan Multimedia Kehumasan	70.740.911
	PT. Onna Prima Utama	Pengadaan Roller Blind Gedung Kelas	160.231.684
	PT. Mitra Global Informatika	Pembelian Remote Control Proyektor	14.184.000
	CV. Taman Aksara Jaya	Pengadaan ATK Mahasiswa	849.220.172
	Honorarium Tim Penulis Jurnal	Didik Kurniawan, dkk	38.520.000
	Honorarium Tim Penyusun Jurnal	Rahmadi Murwanto, dkk	6.760.000
		Penerimaan kembali kelebihan pembayaran uang saku mahasiswa STAR BPKP	12.000.000
	JUMLAH		1.865.808.583

Kas Pada Badan Layanan Umum
C.4 Kas Pada Badan Layanan Umum
 Rp86.380.679.103

Saldo Kas Pada Badan Layanan Umum per tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp86.380.679.103 dan Rp9.025.237.045 mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank, uang muka kerja maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Administrasi Keuangan BLU PKN STAN yang sumbernya berasal dari penerimaan kegiatan operasional BLU. Adapun Kas yang diinvestasikan ke dalam deposito, mulai tahun 2016 dilaporkan ke dalam akun Investasi Jangka Pendek. Kas pada BLU tahun 2015 masih mencakup uang deposito sebesar Rp55.000.000.000. Rekonsiliasi Kas pada Badan Layanan Umum PKN STAN per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Rekonsiliasi Kas pada Badan Layanan Umum

No.	Keterangan	31 Desember 2017
1	Kas di Bank RPL 019 untuk belanja operasional	Rp 2.061.062.748
2	Kas di Bank RPL 019 untuk dana kelolaan	Rp 9.605.281.126
3	Kas di Bank RPL 019 untuk Pengelolaan Kas	Rp 6.455.050.319
4	Kas Tunai	Rp 124.917.400
5	Uang Muka Kerja	Rp 70.000.000.000
6	Selisih karena kesulitan uang pecahan	Rp 93
7	Belanja belum disahkan	
8	<i>Pendapatan belum disahkan</i>	
9	<i>Outstanding Check</i>	Rp (1.862.218.083)
10	<i>Pungutan pajak belum disetorkan</i>	Rp (3.414.500)
	Jumlah	Rp 86.380.679.103

Pada tanggal neraca, PKN STAN memiliki 10 deposito berjangka yaitu:

- Deposito berjangka 1 bulan pada Bank BTN dengan tanggal penempatan 3 Desember 2015 senilai Rp6.000.000.000 tingkat bunga 6,30%;
- Deposito berjangka 1 bulan pada Bank BTN dengan tanggal penempatan 5 Desember 2015 senilai Rp4.000.000.000 tingkat bunga 6,30%;
- Deposito berjangka 1 bulan pada Bank BTN dengan tanggal penempatan 5 Desember 2015 senilai Rp8.000.000.000 tingkat bunga 6,30%;
- Deposito berjangka 1 bulan pada Bank BTN dengan tanggal penempatan 5 Desember 2015 senilai Rp10.000.000.000 tingkat bunga 6,30%;
- Deposito Berjangka 1 bulan pada Bank Mandiri dengan tanggal

- penempatan 20 Desember 2015 senilai Rp10.000.000.000 tingkat bunga 7,25%;
- f. Deposito Berjangka 3 bulan pada Bank Mandiri dengan tanggal penempatan 30 Desember 2015 senilai Rp2.000.000.000 tingkat bunga 7,25%;
 - g. Deposito Berjangka 3 bulan pada Bank Mandiri dengan tanggal penempatan 2 Oktober 2015 senilai Rp3.000.000.000 tingkat bunga 7,25%;
 - h. Deposito Berjangka 1 bulan pada Bank Mandiri dengan tanggal penempatan 31 Desember 2015 senilai Rp4.000.000.000 tingkat bunga 7,25%;
 - i. Deposito Berjangka 1 bulan pada Bank Mandiri dengan tanggal penempatan 18 Desember 2015 senilai Rp8.000.000.000 tingkat bunga 7,25%; dan
 - j. Deposito Berjangka 1 bulan pada Bank Mandiri dengan tanggal penempatan 12 Mei 2016 senilai Rp.15.000.000.000 tingkat bunga 7%.

Rincian Investasi Jangka Pendek – Badan Layanan Umum adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	31 Desember 2017
1	Surat Berharga - Deposito pada BTN	Rp 28.000.000.000
2	Surat Berharga - Deposito pada Bank Mandiri	Rp 42.000.000.000
	Jumlah	Rp 70.000.000.000

Investasi Jangka Pendek – Badan Layanan Umum Rp0

C.5 Investasi Jangka Pendek – Badan Layanan Umum

Saldo Investasi Jangka Pendek – Badan Layanan Umum per tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp70.000.000.000. Investasi Jangka Pendek – Badan Layanan Umum mencakup deposito yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Administrasi Keuangan BLU PKN STAN yang sumbernya berasal dari penerimaan kegiatan operasional BLU.

Kas yang diinvestasikan ke dalam deposito senilai Rp70.000.000.000 sebelumnya dilaporkan pada akun Investasi Jangka Pendek, direklasifikasi ke dalam akun Setara Kas Lainnya – BLU, sesuai dengan S-66/PB/2018 tentang kebijakan Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan BLU Tahun 2017. Pada Neraca, Setara Kas Lainnya – BLU dilaporkan pada pos Kas pada Badan

Layanan Umum.

Belanja Dibayar Di Muka (Prepaid) Rp0

C.6 Belanja Dibayar Di Muka (Prepaid)

Saldo Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*) per tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp556.000.000. Saldo Belanja Dibayar Di Muka (*Prepaid*) tersebut merupakan uang saku bagi Mahasiswa DIV khusus program beasiswa STAR BPKP yang dibayar di muka.

Rincian Belanja Dibayar di Muka (Prepaid)

Per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Uang Saku Pendidikan STAR BPKP Batch II Tahap IV	Rp -	Rp 338.000.000
Uang Saku Pendidikan STAR BPKP Batch III Tahap II	Rp -	Rp 218.000.000
Jumlah	Rp -	Rp 556.000.000

Uang Muka Belanja Pegawai (Prepayment) Rp2.325.422

C.7 Uang Muka Belanja (Prepayment)

Saldo Uang Muka Belanja Pegawai (*Prepayment*) per tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing adalah sebesar Rp2.325.422 dan Rp5.164.011. Uang Muka Belanja di BPPK berupa pembayaran uang muka gaji pegawai. Uang Muka Belanja Pegawai (*Prepayment*) per Satuan Kerja di Lingkungan BPPK adalah sebagai berikut:

Rincian Uang Muka Belanja (Prepayment) per 31 Desember 2017

Unit/Satker	Jumlah (Rp)
PKN STAN	2.325.422
Jumlah	2.325.422

Nilai Uang Muka Belanja tersebut berasal dari Satuan Kerja PKN STAN berupa persekot yang diberikan kepada pegawai sebesar Rp10.770.400 dan telah dilunasi sebesar Rp8.444.978.

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp215.013.699

C.8 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp215.013.699 dan Rp366.468.138. Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

merupakan pendapatan bunga atas jasa layanan perbankan bulan Desember 2017 yang masih harus diterima pada Politeknik Keuangan Negara STAN.

Nama Bank	Jumlah (Rp)
Bank BTN	132.558.904
Bank Mandiri	82.454.795
Jumlah	215.013.699

*Piutang Bukan
Pajak
Rp2.514.327.607*

C.9 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing adalah sebesar Rp2.514.327.607 dan Rp996.586.386. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak per Satuan kerja di Lingkungan BPPK adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2017

Unit/Satker	Nama Debitur	Saldo Piutang (Rp)	Kualitas Piutang
BPPK Pusat	CV Kautsar	7.219.940	Macet
Pusdiklat PSDM	Asuransi Raya	24.888.600	Macet
Pusdiklat PSDM	PT. Kadita Berseri	35.000.000	Macet
Pusdiklat KNPk	PT Grahacipta Ramapratama	62.027.112	Macet
Pusdiklat KNPk	Pegawai Pusdiklat KNPk	12.300.900	Lancar
Pusdiklat KNPk	Pegawai Honorer (PPNPN) Pusdiklat KNPk	2.676.750	Lancar
PKN STAN	PT Menak Pirma Persada	33.039.105	Lancar
PKN STAN	CV Literata Lintas Media	1.290.587.000	Lancar
PKN STAN	CV Putra Mahakam Kalisamarindo	74.399.985	Macet
PKN STAN	CV Putra Mahakam Kalisamarindo	60.245.022	Macet
BDK Pekanbaru	CV Srikandi	411.146.280	Macet
BDK Cimahi	Melisanra Purba	52.600	Lancar
BDK Pontianak	CV Wahanacipta Bangunwisma	255.164.066	Lancar
BDK Manado	PT Paringgawana Bumijaya	214.314.399	Macet
BDK Manado	CV Sinar	14.639.598	Macet
BDK Manado	Adenan H.	2.126.400	Macet
BDK Magelang	CV Nissa Karya Persada	14.499.850	Lancar
	Jumlah	2.514.327.607	

*Bagian Lancar
Tagihan TP/TGR
Rp0*

C.10 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp1.312.435.303.

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum

diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang.

*Piutang dari
Kegiatan
Operasional Badan
Layanan Umum
Rp290.350.000*

C.11 Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum

Saldo Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum per tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing adalah sebesar Rp290.350.000 dan Rp290.350.000. Piutang dari Kegiatan Operasional BLU adalah saldo Piutang dari Kegiatan Operasional BLU yang akan jatuh tempo kurang dari 12 bulan setelah tanggal neraca. Rincian Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum Per 31 Desember 2017

No.	Debitur	Jumlah (Rp)	Kualitas Piutang
1	Mahasiswa Prodi P I OC PBB	290.350.000	Diragukan
	Jumlah	290.350.000	

*Piutang dari
Kegiatan Non
Operasional Badan
Layanan Umum
Rp467.335.113*

C.12 Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum

Saldo Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum per tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing adalah sebesar Rp467.335.113 dan Rp467.335.113. Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU 31 Desember 2017

No.	Debitur	Jumlah (Rp)	Kualitas Piutang
1	PT Sarana Karja Jasa (sudah dilimpahkan)	286.664.703	Macet
2	PT Nugraha Adi Taruna (sudah dilimpahkan)	180.670.410	Macet
	Jumlah	467.335.113	

Piutang dari PT Sarana Karya Jasa yang telah dikategorikan macet, proses penagihannya telah dilimpahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V (KPKNL Jakarta V), sesuai dengan surat pelimpahan yang telah diajukan BLU STAN kepada KPKNL Jakarta V dengan Surat Nomor S-036/AK.1/2012 tanggal 26 Maret 2012. Begitu pula dengan piutang dari PT

Nugraha Adi Taruna, proses penagihannya telah dilimpahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang Banten, sesuai dengan surat PUPN Cabang Banten Nomor SP3N-4/PUPNC.14.03/2015 tanggal 12 Oktober 2015.

*Penyisihan Piutang
Tak Tertagih –
Piutang Lancar
Rp1.526.559.051*

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp1.526.559.051 dan Rp2.708.863.862. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar Per 31 Desember 2017

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek (Rp)	% Penyisihan	Nilai Penyisihan (Rp)
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	1.608.320.271	0,50%	8.041.601
Kurang Lancar		10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	906.007.336	100%	906.007.336
Jumlah	2.514.327.607		914.048.938
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)			
Lancar		0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Piutang Kegiatan Operasional BLU			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	290.350.000	50%	145.175.000
Macet	-	100%	-
Jumlah	290.350.000		145.175.000
Piutang Kegiatan Non Operasional BLU			
Lancar		0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	467.335.113	100%	467.335.113
Jumlah	467.335.113		467.335.113
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	3.272.012.720		1.526.559.051

*Persediaan
Rp3.909.185.171*

C.14 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2017 dan per 31 Desember 2016 masing-masing adalah sebesar Rp3.909.185.171 dan Rp4.141.872.679. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada

masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan
Per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
Barang Konsumsi	3.500.165.144	3.918.335.260
Barang Untuk Pemeliharaan	254.022.842	196.075.509
Bahan Baku	149.206	-
Persediaan Lainnya	154.847.979	27.461.910
Jumlah	3.909.185.171	4.141.872.679

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Rincian Saldo Persediaan Satker Per 31 Desember 2017

No	Unit/Satker	Saldo (Rp)
1	BPPK Pusat	400.880.768
2	Pusdiklat PSDM	540.065.227
3	Pusdiklat KNPk	163.741.922
4	PKN STAN	847.340.186
5	Pusdiklat Pajak	601.631.217
6	Pusdiklat BC	288.222.781
7	Pusdiklat KU	213.222.667
8	Pusdiklat AP	221.238.024
9	BD Pim Magelang	34.977.178
10	BDK Medan	2.541.575
11	BDK Palembang	9.250.995
12	BDK Yogyakarta	110.627.935
13	BDK Malang	104.811.584
14	BDK Balikpapan	13.788.974
15	BDK Makassar	78.729.457
16	BDK Cimahi	89.442.402
17	BDK Manado	123.319.889
18	BDK Pontianak	29.714.330
19	BDK Pekanbaru	19.452.210
20	BDK Denpasar	16.185.850
Total		3.909.185.171

Persediaan BLU
Rp0

C.15 Persediaan BLU

Nilai Persediaan BLU per 31 Desember 2017 dan per 31 Desember 2016 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp648.178.240. Persediaan BLU

adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Saldo pada TA 2017 nihil, sesuai dengan surat Dirjen Perben Nomor S-5992/PB.6/2017 tanggal 7 Juli 2017 hal Rilis Update Aplikasi SAIBA Versi 4.1 dan Petunjuk Teknis Penggunaan Aplikasi serta Penyusunan Laporan Keuangan, bahwa semua aset BLU dicatat menjadi aset non-BLU.

Tanah

Rp5.702.028.221.000

C.16 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki BPPK per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp5.702.028.221.000 dan Rp1.225.103.076.925. Mutasi tanah dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2016	Rp 703.853.145.401
Penambahan :	
Penambahan Saldo Awal dari Aset BLU	Rp 521.249.931.524
Pengembangan Nilai Aset	Rp 1.854.000
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	Rp 4.476.923.290.075
Jumlah	Rp 4.998.175.075.599
Pengurangan	
Jumlah	Rp -
Saldo Tanah per 31 Desember 2017	Rp 5.702.028.221.000
Nilai Buku Tanah per 31 Desember 2017	Rp 5.702.028.221.000

Mutasi tambah berasal dari:

- a. Penambahan Saldo Awal dari aset BLU senilai Rp521.249.931.524.
- b. Pengembangan Nilai Aset berupa Tanah Persil senilai Rp1.854.000.
- c. Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset berupa Lapangan senilai Rp2.143.682.000 dan berupa Tanah Persil senilai Rp4.474.779.608.075.

Rincian aset tetap Tanah disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Tanah BLU Rp0

C.17 Tanah BLU

Nilai aset tetap berupa tanah BLU yang dimiliki BPPK (Satker STAN) per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp521.249.931.524. Mutasi nilai Tanah BLU tersebut merupakan reklasifikasi ke Tanah non-BLU. Hal ini sesuai dengan surat Dirjen Perben Nomor S-5992/PB.6/2017 tanggal 7 Juli 2017 hal Rilis Update Aplikasi SAIBA Versi 4.1 dan Petunjuk Teknis Penggunaan Aplikasi serta Penyusunan Laporan Keuangan, bahwa semua aset BLU dicatat menjadi aset non-BLU.

Peralatan dan
Mesin

Rp320.598.980.382

C.18 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp320.598.980.382 dan Rp202.681.625.819. Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2016	Rp 202.681.625.819
Penambahan :	
Penambahan Saldo Awal dari Aset BLU	Rp 55.029.304.654
Pembelian	Rp 47.840.584.338
Transfer Masuk	Rp 4.043.354.181
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	Rp 18.010.017.150
Reklasifikasi Masuk	Rp 364.629.440
Penyelesaian Pembangunan Langsung	Rp 23.980.000
Pengembangan Nilai Aset	Rp 158.717.525
Jumlah	Rp 125.470.587.288
Pengurangan	
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	Rp (2.503.500)
Penghapusan	Rp (273.460.000)
Transfer Keluar	Rp (4.043.354.181)
Reklasifikasi Keluar	Rp (360.431.940)
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola	Rp (8.760.400)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	Rp (2.864.722.704)
Jumlah	Rp (7.553.232.725)
Saldo P&M per 31 Desember 2017	Rp 320.598.980.382
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2017	Rp 228.000.673.987
Nilai Buku P&M per 31 Desember 2017	Rp 92.598.306.395

Mutasi tambah berasal dari:

- Penambahan Saldo Awal dari aset BLU senilai Rp55.029.304.654.
- Pembelian:

No	Barang	Unit	Nilai (Rp)
1	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	12	1.978.465.900
2	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	26	61.434.500
3	ALAT BANTU	19	792.033.255
4	ALAT BENGKEL BERMESIN	3	19.483.200
5	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	4	15.372.500
6	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	2	3.347.300
7	ALAT KANTOR	968	6.129.684.115
8	ALAT KEDOKTERAN	4	7.231.400
9	ALAT KESEHATAN UMUM	4	18.380.000
10	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	46	70.838.565
11	ALAT KOMUNIKASI	95	919.222.325
12	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALI	1	478.500
13	ALAT PELINDUNG	1	960.300
14	ALAT PENGOLAHAN	8	100.525.700
15	ALAT RUMAH TANGGA	6.353	15.969.592.359
16	ALAT STUDIO	491	3.985.061.088
17	ALAT UKUR	3	23.203.100
18	KOMPUTER UNIT	693	8.443.617.163
19	PERALATAN KOMPUTER	512	4.723.935.187
20	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAM	2	8.184.000
21	PERALATAN OLAH RAGA	67	587.198.700
22	PERALATAN PEMANCAR	7	3.951.820.081
23	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	1	1.710.500
24	UNIT ALAT LABORATORIUM	2	7.810.000
25	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	3	20.994.600
TOTAL		9.327	47.840.584.338

c. Transfer Masuk:

No	Barang	Unit	Nilai (Rp)
1	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	5	1.638.600.000
2	ALAT KANTOR	58	426.300.000
3	ALAT KEDOKTERAN	1	910.000
4	ALAT RUMAH TANGGA	122	578.729.981
5	KOMPUTER UNIT	57	318.804.200
6	PERALATAN KOMPUTER	37	1.074.510.000
7	PERALATAN OLAH RAGA	1	5.500.000
TOTAL		280	4.043.354.181

d. Penyelesaian Pembangunan dengan KDP:

No	Barang	Unit	Nilai (Rp)
1	ALAT KANTOR	148	840.457.050
2	ALAT RUMAH TANGGA	476	15.192.914.900
3	ALAT STUDIO	1	133.924.800
4	KOMPUTER UNIT	135	1.825.604.800
5	PERALATAN KOMPUTER	4	17.115.600
TOTAL		764	18.010.017.150

e. Reklasifikasi Masuk:

No	Barang	Unit	Nilai (Rp)
1	ALAT BANTU	1	298.035.000
2	ALAT KANTOR	1	2.357.090
3	ALAT RUMAH TANGGA	25	43.388.850
4	ALAT SAR	2	1.890.000
5	KOMPUTER UNIT	3	15.658.500
6	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	2	3.300.000
TOTAL		34	364.629.440

f. Penyelesaian Pembangunan Langsung berupa Alat Rumah Tangga sejumlah 1 unit senilai Rp23.980.000

g. Pengembangan Nilai Aset:

No	Barang	Unit	Nilai (Rp)
1	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	0	5.160.000
2	ALAT KANTOR	0	25.001.527
3	ALAT RUMAH TANGGA	0	49.196.000
4	ALAT STUDIO	0	25.850.000
5	KOMPUTER UNIT	0	31.519.998
6	PERALATAN KOMPUTER	0	17.440.000
7	PERALATAN PEMANCAR	0	4.550.000
TOTAL		0	158.717.525

Mutasi kurang:

a. Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-) berupa Alat Kantor senilai (Rp2.503.500).

b. Penghapusan berupa Alat Bantu sejumlah 1 unit senilai (Rp267.960.000) dan Alat Rumah Tangga sejumlah 1 unit senilai (Rp5.500.000).

c. Transfer Keluar:

No	Barang	Unit	Nilai (Rp)
1	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-5	(1.638.600.000)
2	ALAT KANTOR	-58	(426.300.000)
3	ALAT KEDOKTERAN	-1	(910.000)
4	ALAT RUMAH TANGGA	-122	(578.729.981)
5	KOMPUTER UNIT	-57	(318.804.200)
6	PERALATAN KOMPUTER	-37	(1.074.510.000)
7	PERALATAN OLAH RAGA	-1	(5.500.000)
TOTAL		-281	(4.043.354.181)

d. Reklasifikasi Keluar:

No	Barang	Unit	Nilai (Rp)
1	ALAT BANTU	-2	(1.890.000)
2	ALAT KANTOR	-1	(298.035.000)
3	ALAT KEDOKTERAN	-11	(4.174.500)
4	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	-1	(2.357.090)
5	ALAT RUMAH TANGGA	-11	(34.356.850)
6	KOMPUTER UNIT	-3	(15.658.500)
7	UNIT ALAT LABORATORIUM	-1	(3.960.000)
TOTAL		-30	(360.431.940)

- e. Usulan Barang Rusak ke Pengelola berupa Komputer Unit sejumlah 1 unit senilai (Rp8.760.400).
- f. Penghentian Aset dari Penggunaan:

No	Barang	Unit	Nilai (Rp)
1	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-11	(497.936.210)
2	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	-1	(3.355.000)
3	ALAT BANTU	-2	(14.089.373)
4	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	-2	(128.000)
5	ALAT KANTOR	-98	(585.851.948)
6	ALAT KOMUNIKASI	-8	(19.106.000)
7	ALAT RUMAH TANGGA	-458	(639.695.843)
8	ALAT STUDIO	-91	(106.199.500)
9	KOMPUTER UNIT	-108	(942.166.100)
10	PERALATAN KOMPUTER	-24	(56.194.730)
TOTAL		-803	(2.864.722.704)

Pada tahun 2017 terdapat pembelian aset Peralatan & Mesin Ekstrakomtabel senilai Rp38.948.900 yang terdiri dari:

No	Barang	Unit	Nilai (Rp)
1	ALAT KOMUNIKASI	3	780.000
2	ALAT RUMAH TANGGA	125	34.128.600
3	PERALATAN KOMPUTER	21	4.040.300
TOTAL		149	38.948.900

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Peralatan dan
Mesin BLU Rp0*

C.19 Peralatan dan Mesin BLU

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin BLU per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp55.029.304.654. Mutasi nilai peralatan dan mesin BLU tersebut merupakan reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin non-BLU.

*Gedung dan
Bangunan Rp
900.253.028.051*

C.20 Gedung dan Bangunan

Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp900.253.028.051 dan Rp655.852.071.660.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2016	Rp 655.852.071.660
Penambahan :	
Penambahan Saldo Awal dari Aset BLU	Rp 199.435.548.155
Pembelian	Rp 193.378.552
Transfer Masuk	Rp 6.318.276.000
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	Rp 3.413.487.760
Reklasifikasi Masuk	Rp 18.795.599.000
Barang Berlebih Hasil Inventarisasi	Rp 3.598.877.000
Reklasifikasi Masuk Hasil Inventarisasi	Rp 16.403.341.842
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	Rp 808.508.971
Pengembangan Nilai Aset	Rp 2.319.549.188
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	Rp 877.805.073
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (+)	Rp 223.782.461.140
Penerimaan Aset Tetap Renovasi	Rp 437.373.800
Pengembangan Melalui KDP	Rp 10.777.345.852
Jumlah	Rp 487.161.552.333
Pengurangan	
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	Rp (2.417.538.640)
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (-)	Rp (61.632.526.135)
Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali	Rp (137.020.204.253)
Transfer Keluar	Rp (2.872.215.000)
Reklasifikasi Keluar	Rp (19.278.491.541)
Koreksi Pencatatan	Rp (212.469.560)
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola	Rp (2.115.300.000)
Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi	Rp (16.403.341.842)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	Rp (808.508.971)
Jumlah	Rp (242.760.595.942)
Saldo G&B per 31 Desember 2017	Rp 900.253.028.051
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2017	Rp 23.016.860.304
Nilai Buku G&B per 31 Desember 2017	Rp 877.236.167.747

Mutasi tambah berupa:

- Penambahan Saldo Awal dari Aset BLU senilai Rp199.435.548.155.
- Pembelian berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja sejumlah 1 unit senilai Rp193.378.552.
- Transfer Masuk berupa Bangunan Gedung Tempat Tinggal sejumlah 27 unit senilai Rp6.318.276.000.
- Penyelesaian Pembangunan dengan KDP

No	Barang	Unit	Nilai
1	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	4	Rp 2.017.422.273
2	TUGU/TANDA BATAS	1	Rp 1.396.065.487
TOTAL		5	Rp 3.413.487.760

e. Reklasifikasi Masuk berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja sejumlah 2 unit senilai Rp18.795.599.000.

f. Barang Berlebih Hasil Inventarisasi

No	Barang	Unit	Nilai
1	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	14	Rp 3.389.713.000
2	TUGU/TANDA BATAS	1	Rp 209.164.000
TOTAL		15	Rp 3.598.877.000

g. Reklasifikasi Masuk Hasil Inventarisasi

No	Barang	Unit	Nilai (Rp)
1	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	6	743.162.000
2	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	1	15.485.366.842
3	TUGU/TANDA BATAS	1	174.813.000
TOTAL		8	16.403.341.842

h. Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja sejumlah 1 unit senilai Rp808.508.971

i. Pengembangan Nilai Aset

No	Barang	Unit	Nilai
1	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	0	Rp 2.163.513.575
2	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	0	Rp 156.035.613
TOTAL		0	Rp 2.319.549.188

j. Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas

No	Barang	Unit	Nilai
1	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	0	Rp 157.357.216
2	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	0	Rp 720.447.857
TOTAL		0	Rp 877.805.073

k. Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset

No	Barang	Unit	Nilai (Rp)
1	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	0	136.915.230.876
2	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	0	84.798.671.114
3	TUGU/TANDA BATAS	0	2.068.559.150
TOTAL		0	223.782.461.140

l. Penerimaan Aset Tetap Renovasi berupa Bangunan Gedung Tempat Tinggal senilai Rp437.373.800

m. Pengembangan Melalui KDP

No	Barang	Unit	Nilai
1	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	0	Rp 8.345.260.289
2	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	0	Rp 2.432.085.563
TOTAL		0	Rp 10.777.345.852

Mutasi kurang berupa:

a. Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-):

No	Barang	Unit	Nilai
1	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	0	Rp (779.214.530)
2	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	0	Rp (1.638.324.110)
TOTAL		0	Rp (2.417.538.640)

b. Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset

No	Barang	Unit	Nilai (Rp)
1	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	0	(55.659.351.369)
2	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	0	(3.589.668.437)
3	TUGU/TANDA BATAS	0	(2.383.506.329)
TOTAL		0	(61.632.526.135)

c. Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali:

No	Barang	Unit	Nilai (Rp)
1	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	0	(112.418.841.103)
2	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	0	(22.798.988.358)
3	TUGU/TANDA BATAS	0	(1.802.374.792)
TOTAL		0	(137.020.204.253)

d. Transfer Keluar berupa Bangunan Gedung Tempat Tinggal sejumlah 13 unit senilai (Rp2.872.215.000).

e. Reklasifikasi Keluar berupa Bangunan Gedung Tempat kerja sejumlah 4 unit senilai (Rp19.278.491.541).

f. Koreksi Pencatatan berupa Bangunan Gedung Tempat kerja sejumlah 5 unit senilai (Rp212.469.560).

g. Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola berupa Bangunan Gedung Tempat Tinggal sejumlah 25 unit senilai (Rp2.115.300.000).

h. Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi

No	Barang	Unit	Nilai
1	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	-3	Rp (716.675.000)
2	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	-1	Rp(15.686.666.842)
TOTAL		-4	Rp(16.403.341.842)

- i. Penghentian Aset dari Penggunaan berupa Bangunan Gedung Tempat kerja sejumlah 1 unit senilai (Rp808.508.971).

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Gedung dan
Bangunan BLU Rp0*

C.21 Gedung dan Bangunan BLU

Saldo gedung dan bangunan BLU per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah Rp0 dan Rp199.435.548.155. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan BLU tersebut merupakan reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan non-BLU.

*Jalan, Irigasi dan
Jaringan Rp
36.419.374.778*

C.22 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp36.419.374.778 dan Rp27.484.841.688.

Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

- a. Jalan dan Jembatan

Saldo per 31 Desember 2016	Rp	4.448.764.863
Penambahan :		
Penambahan Saldo Awal dari Aset BLU	Rp	11.793.417.161
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (+)	Rp	4.825.456.936
Pengembangan Melalui KDP	Rp	206.832.553
Jumlah	Rp	16.825.706.650
Pengurangan :		
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (-)	Rp	(1.000.256.655)
Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali	Rp	(11.803.247.234)
Reklasifikasi Keluar	Rp	(3.300.000)
Koreksi Pencatatan	Rp	(1.991.732.071)
Jumlah	Rp	(14.798.535.960)
Saldo Jalan dan Jembatan per 31 Des 2017	Rp	6.475.935.553
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Des 2017	Rp	2.540.361.140
Nilai Buku Jalan dan Jembatan per 31 Des 2017	Rp	3.935.574.413

Mutasi Tambah berupa:

1. Penambahan Saldo Awal dari Aset BLU senilai Rp11.793.417.161
2. Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (+) berupa Jalan senilai

Rp4.825.456.936

3. Pengembangan Melalui KDP berupa Jalan senilai Rp206.832.553.

Mutasi Kurang berupa:

1. Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (-) berupa Jalan senilai (Rp520.372.915) dan berupa Jembatan senilai (Rp479.883.740)
2. Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali berupa Jalan senilai (Rp11.513.914.974) dan berupa Jembatan senilai (Rp289.332.260)
3. Reklasifikasi Keluar berupa Jembatan sejumlah 2 unit senilai (Rp3.300.000)
4. Koreksi Pencatatan berupa Jalan sejumlah 5.521 m2 senilai (Rp1.969.532.071) dan berupa Jembatan sejumlah 1 unit senilai (Rp22.200.000)

b. Irigasi

Saldo per 31 Desember 2016	Rp	4.562.866.529
Penambahan :		
Penambahan Saldo Awal dari Aset BLU	Rp	3.890.450.584
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	Rp	943.409.074
Reklasifikasi Masuk Hasil Inventarisasi	Rp	3.600.000
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	Rp	42.518.335
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (+)	Rp	1.355.072.306
Jumlah	Rp	6.235.050.299
Pengurangan		
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (-)	Rp	(1.757.944.287)
Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali	Rp	(3.378.891.272)
Reklasifikasi Keluar	Rp	(822.500)
Koreksi Pencatatan	Rp	(83.667.800)
Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi	Rp	(3.600.000)
Jumlah	Rp	(5.224.925.859)
Saldo Irigasi per 31 Des 2017	Rp	5.572.990.969
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Des 2017	Rp	307.246.272
Nilai Buku Irigasi per 31 Des 2017	Rp	5.265.744.697

Mutasi Tambah berupa:

1. Penambahan Saldo Awal dari Aset BLU senilai Rp3.890.450.584
2. Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP berupa Bangunan Air Bersih/Air Baku sejumlah 1 unit senilai Rp943.409.074
3. Reklasifikasi Masuk Hasil Inventarisasi berupa Bangunan Air Bersih/Air Baku sejumlah 4 unit senilai Rp3.600.000
4. Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas berupa Bangunan Air Bersih/Air Baku senilai Rp42.518.335
5. Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (+)

No	Barang	Unit	Nilai
1	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	0	Rp 1.061.020.621
2	BANGUNAN AIR KOTOR	0	Rp 26.124.492
3	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	0	Rp 144.846.000
4	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	0	Rp 123.081.193
TOTAL		0	Rp 1.355.072.306

Mutasi kurang berupa:

1. Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (-)

No	Barang	Unit	Nilai
1	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	0	Rp 1.061.020.621
2	BANGUNAN AIR KOTOR	0	Rp 26.124.492
3	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	0	Rp 144.846.000
4	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	0	Rp 123.081.193
TOTAL		0	Rp 1.355.072.306

2. Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali

No	Barang	Unit	Nilai
1	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	0	Rp (203.445.631)
2	BANGUNAN AIR KOTOR	0	Rp (54.824.434)
3	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	0	Rp (2.851.417.515)
4	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	0	Rp (269.203.692)
TOTAL		0	Rp (3.378.891.272)

3. Reklasifikasi Keluar berupa Bangunan Air Bersih/Air Baku sejumlah 1 unit senilai (Rp822.500)

4. Koreksi Pencatatan

No	Barang	Unit	Nilai
1	BANGUNAN AIR IRIGASI	-1	Rp (10.091.000)
2	BANGUNAN AIR KOTOR	-1	Rp (73.576.800)
TOTAL		-2	Rp (83.667.800)

5. Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi berupa Bangunan Air Bersih/Air Baku sejumlah 4 unit senilai (Rp3.600.000)

c. Jaringan

Saldo per 31 Desember 2016	Rp	18.473.210.296
Penambahan :		
Penambahan Saldo Awal dari Aset BLU	Rp	5.029.842.819
Reklasifikasi Masuk	Rp	482.817.541
Penyelesaian Pembangunan Langsung	Rp	197.483.000
Pengembangan Nilai Aset	Rp	187.094.600
Jumlah	Rp	5.897.237.960
Pengurangan		
Jumlah	Rp	-
Saldo Jaringan per 31 Des 2017	Rp	24.370.448.256
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Des 2017	Rp	4.988.557.391
Nilai Buku Jaringan per 31 Des 2017	Rp	19.381.890.865

Mutasi tambah berupa:

1. Penambahan Saldo Awal dari Aset BLU senilai 5.029.842.819.
2. Reklasifikasi Masuk berupa Instalasi Air Bersih/Air Baku sejumlah 1 unit senilai Rp482.817.541.
3. Penyelesaian Pembangunan Langsung

No	Barang	Unit	Nilai
1	INSTALASI LAIN	2	Rp 172.403.000
2	JARINGAN LISTRIK	1	Rp 25.080.000
TOTAL		3	Rp 197.483.000

4. Pengembangan Nilai Aset berupa Jaringan Listrik senilai Rp187.094.600.

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Jalan, Irigasi dan Jaringan BLU Rp0

C.23 Jalan, Irigasi dan Jaringan BLU

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp20.713.710.564. Mutasi nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan BLU tersebut merupakan reklasifikasi ke Jalan, Irigasi dan Jaringan non-BLU.

Aset Tetap Lainnya Rp 16.280.591.524

C.24 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan

jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp16.280.591.524 dan Rp6.309.260.496.

Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2016	Rp 6.309.260.496
Penambahan :	
Penambahan Saldo Awal dari Aset BLU	Rp 11.171.587.251
Pembelian	Rp 557.648.529
Transfer Masuk	Rp 535.649.650
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	Rp 258.890.000
Jumlah	Rp 12.523.775.430
Pengurangan	
Transfer Keluar	Rp (535.649.650)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	Rp (2.016.794.752)
Jumlah	Rp (2.552.444.402)
Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Des 2017	Rp 16.280.591.524
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Des 2017	Rp 119.397.051
Nilai Buku Aset Tetap Lainnya per 31 Des 2017	Rp 16.161.194.473

Mutasi tambah:

- a. Penambahan Saldo Awal dari Aset BLU senilai Rp11.171.587.251.
- b. Pembelian

No	Barang	Unit	Nilai
1	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	2.363	Rp 419.375.529
2	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM D	2	Rp 99.850.000
3	BARANG BERCORAK KESENIAN	4	Rp 38.423.000
TOTAL		2.369	Rp 557.648.529

- c. Transfer Masuk berupa Bahan Perpustakaan Tercetak sejumlah 1.232 unit senilai Rp535.649.650
- d. Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP berupa Bahan Perpustakaan Tercetak sejumlah 1 unit senilai Rp258.890.000.

Mutasi kurang:

- a. Transfer Keluar berupa Bahan Perpustakaan Tercetak sejumlah 1.232 unit senilai (Rp535.649.650)
- b. Penghentian Aset dari Penggunaan berupa Bahan Perpustakaan Tercetak sejumlah 29.085 unit senilai (Rp2.016.794.752)

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap Lainnya
BLU Rp0

C.25 Aset Tetap Lainnya BLU

Aset Tetap Lainnya BLU merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya BLU per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp11.171.587.251. Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya BLU tersebut merupakan reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya non-BLU.

Konstruksi Dalam
Pengerjaan Rp
5.550.698.300

C.26 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp5.550.698.300 dan Rp5.615.079.100 yang merupakan pembangunan gedung dan bangunan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca.

Rincian mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

NO	JENIS KDP	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	Tanah	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
2	PerMes	Rp -	Rp 18.055.755.150	Rp -18.055.755.150	Rp -
3	Ged & Bang.	Rp 5.615.079.100	Rp 15.507.235.686	Rp -15.571.616.486	Rp 5.550.698.300
4	J I J	Rp -	Rp 206.832.553	Rp -206.832.553	Rp -
5	ATL	Rp -	Rp 258.890.000	Rp -258.890.000	Rp -
JUMLAH		Rp 5.615.079.100	Rp 34.028.713.389	Rp -34.093.094.189	Rp 5.550.698.300

Rincian lebih lanjut dari Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran.

Konstruksi Dalam
Pengerjaan BLU
Rp0

C.27 Konstruksi Dalam Pengerjaan BLU

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) BLU per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 tidak terdapat perubahan yaitu sebesar Rp0 yang merupakan pembangunan gedung dan bangunan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca.

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp258.973.096.145

C.28 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing Rp258.973.096.145 dan

Rp355.509.071.417.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2017, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Rincian	31 Desember 2017	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku Setelah Penyusutan
1	Peralatan dan Mesin	Rp 320.598.980.382	Rp 228.000.673.987	Rp 92.598.306.395
2	Gedung dan Bangunan	Rp 900.253.028.051	Rp 23.016.860.304	Rp 877.236.167.747
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Rp 36.419.374.778	Rp 7.836.164.803	Rp 28.583.209.975
4	Aset Tetap Lainnya	Rp 16.280.591.524	Rp 119.397.051	Rp 16.161.194.473
Jumlah		Rp 1.273.551.974.735	Rp 258.973.096.145	Rp 1.014.578.878.590

Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada lampiran.

*Piutang Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi
Rp1.351.942.144*

C.29 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi

Nilai Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp1.351.942.144 dan Rp0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan /Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) adalah sebagai berikut:

**Rincian Piutang Tagihan Tuntutan TP/TGR
31 Desember 2017**

No	Nama	31 Desember 2017	Kualitas Piutang
1	Jolomebath	Rp 5.000.000	Macet
2	Hartadi Sutomo	Rp 63.900.000	Macet
3	Petrus P. S. Depari	Rp 1.201.887.598	Macet
4	Danu Nugroho	Rp 25.500.000	Kurang Lancar
5	Ryandi Aditya	Rp 21.000.000	Kurang Lancar
6	Setyo Utomo	Rp 34.654.546	Macet
Jumlah		Rp 1.351.942.144	

Penyisihan Piutang
Tak Tertagih –
TP/TGR Jangka
Panjang
Rp1.310.092.144

C.30 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – TP/TGR Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – TP/TGR Jangka Panjang per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp1.351.942.144 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang TPA. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – TP/TGR Jangka Panjang pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – TP/TGR Jangka Panjang

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	Rp -	0,50%	Rp -
Kurang Lancar	Rp 46.500.000	10%	Rp 4.650.000
Diragukan	Rp -	50%	Rp -
Macet	Rp 1.305.442.144	100%	Rp 1.305.442.144
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	Rp 1.351.942.144		Rp 1.310.092.144

Aset Tetap dalam
Renovasi Rp0

C.31 Aset Tetap dalam Renovasi

Nilai perolehan Aset Tetap dalam Renovasi per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Aset Tetap dalam Renovasi merupakan renovasi yang dilakukan terhadap aset tetap bukan milik satker.

Pada tahun 2017, satker Sekretariat BPPK melakukan renovasi atas aset Gedung dan Bangunan milik satker Pusdiklat KNPK dengan nilai ATR sebesar Rp437.373.800. Atas nilai ATR tersebut sudah diserahkan ke satker Pusdiklat KNPK sehingga saldo Aset Tetap dalam Renovasi per tanggal pelaporan menjadi sebesar Rp0.

Aset Tak Berwujud
Rp9.613.161.972

C.32 Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp9.613.161.972 dan Rp7.258.491.222. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

Mutasi tambah Aset Tak Berwujud berupa Penambahan Saldo Awal dari Aset Tak Berwujud BLU senilai Rp2.285.211.250, Pembelian Software sejumlah 4 unit senilai Rp64.509.500, dan Pengembangan Nilai Aset pada Software senilai Rp4.950.000.

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak Berwujud TA 2017

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Software	4.838.100.439
2	ATB Lainnya	4.775.061.533
Jumlah Nilai Perolehan per 31 Des 2017		9.613.161.972
Akumulasi Amortisasi per 31 Des 2017		4.775.807.894
Jumlah Nilai Buku per 31 Des 2017		4.837.354.078

Aset Tak Berwujud
BLU Rp0

C.33 Aset Tak Berwujud BLU

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) BLU per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp2.285.211.250. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Semua aset tak berwujud BLU di BPPK berupa *software*.

Mutasi nilai Aset Tak Berwujud BLU tersebut merupakan reklasifikasi ke Aset Tetap Tak Berwujud Non-BLU

Aset Lain-Lain Rp
14.836.529.031

C.34 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp14.836.529.031 dan Rp12.218.867.485. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional BPPK serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Saldo Aset Lain-Lain terdiri dari:

1. Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan sebesar Rp13.557.453.131.
2. Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan sebesar Rp1.279.075.900.

Adapun mutasi Aset Lain-Lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2016	Rp 12.218.867.485
Penambahan :	
Penambahan Saldo Awal dari Aset Lain-Lain BLU	Rp 2.571.365.577
Reklas dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	Rp 5.690.026.427
Jumlah	Rp 8.261.392.004
Pengurangan	
Penghapusan (BMN yang Dihentikan)	Rp (2.366.350.601)
Usulan Barang Rusak Berat (BMN yang Dihentikan)	Rp (2.468.870.886)
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan	Rp (808.508.971)
Jumlah	Rp (5.643.730.458)
Saldo Aset Lain-Lain per 31 Des 2017	Rp 14.836.529.031
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Des 2017	Rp 10.855.773.028
Nilai Buku Aset Lain-Lain per 31 Des 2017	Rp 3.980.756.003

Mutasi tambah berupa:

- a. Penambahan Saldo Awal dari Aset Lain-Lain BLU senilai Rp2.571.365.577
- b. Reklasifikasi dari Aset ke Aset Lainnya:

No	Barang	Unit	Nilai (Rp)
1	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	11	497.936.210
2	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	1	3.355.000
3	ALAT BANTU	2	14.089.373
4	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	2	128.000
5	ALAT KANTOR	98	585.851.948
6	ALAT KOMUNIKASI	8	19.106.000
7	ALAT RUMAH TANGGA	458	639.695.843
8	ALAT STUDIO	91	106.199.500
9	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	29.085	2.016.794.752
10	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	1	808.508.971
11	KOMPUTER UNIT	108	942.166.100
12	PERALATAN KOMPUTER	24	56.194.730
TOTAL		29.889	5.690.026.427

Mutasi kurang berupa:

- a. Penghapusan (BMN yang Dihentikan)

No	Barang	Unit	Nilai (Rp)
1	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-10	(494.290.500)
2	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	-1	(479.000)
3	ALAT BANTU	-1	(132.562.000)
4	ALAT KANTOR	-14	(250.905.340)
5	ALAT KOMUNIKASI	-10	(20.579.000)
6	ALAT RUMAH TANGGA	-371	(323.575.951)
7	ALAT STUDIO	-64	(75.168.175)
8	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	-4.814	(102.467.705)
9	KOMPUTER UNIT	-76	(699.085.705)
10	PERALATAN KOMPUTER	-28	(172.540.225)
11	TUGU/TANDA BATAS	-1	(94.697.000)
TOTAL		-5.389	(2.366.350.601)

b. Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN yang Dihentikan)

No	Barang	Unit	Nilai (Rp)
1	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-9	(370.510.740)
2	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	-2	(1.100.000)
3	ALAT KANTOR	-18	(193.199.290)
4	ALAT KOMUNIKASI	-5	(12.735.000)
5	ALAT RUMAH TANGGA	-266	(368.296.360)
6	ALAT STUDIO	-8	(18.619.500)
7	KOMPUTER UNIT	-109	(1.394.736.096)
8	PERALATAN KOMPUTER	-19	(109.673.900)
TOTAL		-436	(2.468.870.886)

c. Penggunaan Kembali BMN yang Sudah Dihentikan berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja sejumlah 1 unit senilai (Rp808.508.971).

Terdapat perbedaan saldo Aset Lain-Lain antara SAIBA dan SIMAK sebesar Rp16.600.000 yang merupakan jurnal SAIBA atas aset hilang di BDPim Magelang.

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada lampiran.

Aset Lain-Lain BLU
Rp0

C.35 Aset Lain-Lain BLU

Saldo Aset Lain-lain BLU per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp2.571.365.577. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional BPPK serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Mutasi nilai Aset Lain-Lain BLU tersebut merupakan reklasifikasi ke Aset Lain-Lain non-BLU

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp15.648.180.922

C.36 Akumulasi Penyusutan / Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan / Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp15.648.180.922 dan Rp17.301.877.162. Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan / Amortisasi Aset Lainnya

No	Rincian	31 Desember 2017	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	Nilai Buku Setelah Penyusutan
1	Aset Tak Berwujud	Rp 9.613.161.972	Rp 4.775.807.894	Rp 4.837.354.078
2	Aset Lain-Lain	Rp 14.836.529.031	Rp 10.872.373.028	Rp 3.964.156.003
Jumlah		Rp 24.449.691.003	Rp 15.648.180.922	Rp 8.801.510.081

Terdapat perbedaan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain antara SAIBA dan SIMAK sebesar Rp16.600.000 yang merupakan jurnal SAIBA atas aset hilang di BDPim Magelang.

Utang kepada Pihak
Ketiga

Rp2.850.274.811

C.37 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp2.850.274.811 dan Rp880.746.242. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan akan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Utang kepada Pihak Ketiga terdiri dari kekurangan belanja pegawai yang belum dibayar; prestasi pekerjaan yang telah selesai namun belum dilakukan pembayaran baik yang berasal dari kontrak maupun perolehan barang/jasa; Utang kepada pihak ketiga BLU, dan Dana Pihak Ketiga berupa *Outstanding Cheque*. Rincian Utang kepada Pihak Ketiga disajikan sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2017

Uraian	31 Des 2017 (Rp)	31 Des 2016 (Rp)	% Naik (Turun)
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	28.603.000	24.038.885	18,99
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	952.840.764	812.851.915	17,22
Utang kepada Pihak Ketiga BLU	-	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	15.198.464	43.855.442	(65,34)
Dana Pihak Ketiga	1.853.632.583	-	-
Jumlah	2.850.274.811	880.746.242	223,62

Uang Muka dari
KPPN Rp0

C.38 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp21.275.000. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Pendapatan
Diterima di Muka
Rp22.221.569

C.39 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp22.221.569 dan Rp592.855.373. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima/disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga.

Rincian Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2017

Uraian	31 Des 2017 (Rp)	31 Des 2016 (Rp)	% Naik (Turun)
Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	22.221.569	10.888.706	104,08
Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima Dimuka	-	581.966.667	(100,00)
Jumlah	22.221.569	592.855.373	(96,25)

Beban yang Masih harus Dibayar Rp981.443.764

C.40 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp981.443.764 dan Rp836.890.800, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum dilakukan pembayaran berupa belanja pegawai yang belum dibayar; dan prestasi pekerjaan yang telah selesai namun belum dilakukan pembayaran baik yang berasal dari kontrak maupun perolehan barang/jasa dengan rincian sebagai berikut.

Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Keterangan	31 Des 2017 (Rp)	31 Des 2016 (Rp)
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	28.603.000	24.038.885
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	952.840.764	812.851.915
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	-	-
Jumlah	981.443.764	836.890.800

Utang Jangka Pendek Lainnya Rp0

C.41 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang Jangka Pendek Lainnya di BPPK merupakan Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor.

Ekuitas Rp6.822.257.127.238

C.42 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp6.822.257.127.238 dan Rp2.144.570.112.820. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas berupa selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNBP
Rp47.637.372.009

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp47.637.372.009 dan Rp41.167.532.327. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan Rincian Pendapatan *31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016*

Uraian	31 Des 2017 (Rp)	31 Des 2016 (Rp)	% Naik (Turun)
Pendapatan PNBP Lainnya			
Pendapatan Jasa			
Pendapatan Penjualan Lainnya	11,180,000	-	-
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	306,121,010	809,800,102	(62.20)
Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi Sesuai Dengan Tugas dan Fungsi Masing-Masing Kementerian Negara/Lembaga	1,317,000,000	1,855,500,000	(29.02)
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	1,920,030	2,564	74,784.17
Pendapatan Pendidikan Lainnya	220,400,000	424,800,000	(48.12)
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	162,855,069	72,372,948	125.02
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	36,431,801,962	33,243,688,333	9.59
Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi	-	424,757	(100.00)
Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	755,725,756	-	-
Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	2,118,161,750	-	-
Pendapatan Hasil Kerja Sama Pemerintah Daerah	2,434,150,000	-	-
Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	3,789,132,822	4,256,725,557	(10.98)
Jumlah Pendapatan Jasa	47,548,448,399	40,663,314,261	16.93
Pendapatan Lain-Lain			
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	423,610	-	-
Pendapatan Anggaran Lain-lain	88,500,000	504,218,066	(82.45)
Jumlah Pendapatan Lain-Lain	88,923,610	504,218,066	(82.36)
Jumlah	47,637,372,009	41,167,532,327	15.72

Beban Pegawai
Rp80.661.681.578

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp80.661.681.578 dan Rp76.021.916.004. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan aturan undang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

**Perbandingan Rincian Beban Pegawai
31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016**

Uraian	31 Des 2017 (Rp)	31 Des 2016 (Rp)	% Naik (Turun)
Beban Gaji Pokok PNS	55,928,499,010	53,963,186,880	3.64
Beban Pembulatan Gaji PNS	801,291	743,938	7.71
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	3,744,472,911	3,440,343,782	8.84
Beban Tunj. Anak PNS	1,053,529,486	952,780,272	10.57
Beban Tunj. Struktural PNS	1,935,355,000	1,932,462,974	0.15
Beban Tunj. Fungsional PNS	2,246,510,000	2,113,560,000	6.29
Beban Tunj. PPh PNS	140,439,182	535,135,358	(73.76)
Beban Tunj. Beras PNS	2,983,554,180	2,824,758,800	5.62
Beban Uang Makan PNS	8,144,956,850	7,612,306,200	7.00
Beban Tunjangan Umum PNS	2,021,175,000	2,039,365,000	(0.89)
Beban Uang Lembur	502,572,500	542,061,800	(7.29)
Beban Gaji dan Tunjangan	1,959,816,168	65,211,000	2,905.35
Jumlah	80,661,681,578	76,021,916,004	6.10

Beban Persediaan
Rp15.244.431.653

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp15.244.431.653 dan Rp15.476.682.541.

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

**Perbandingan Rincian Beban Persediaan
31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016**

Uraian	31 Des 2017 (Rp)	31 Des 2016 (Rp)	% Naik (Turun)
Beban Persediaan konsumsi	14.866.208.844	12.998.626.095	14,37
Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges	570.000	8.178.000	(93,03)
Beban Persediaan bahan baku	15.553.565	153.250.400	(89,85)
Beban Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	-	-	-
Beban Persediaan Lainnya	362.099.244	110.215.615	228,54
Beban Persediaan BLU Pelayanan Pendidikan	-	2.206.412.431	(100,00)
Jumlah Beban Persediaan	15.244.431.653	15.476.682.541	(1,50)

Beban Barang dan Jasa
Rp392.050.969.497

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan jasa 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp392.050.969.497 dan Rp343.000.213.746.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan

Jasa 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

**Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa
31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016**

Uraian	31 Des 2017 (Rp)	31 Des 2016 (Rp)	% Naik (Turun)
Beban Keperluan Perkantoran	24.090.553.148	22.269.888.500	8,18
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	430.564.806	374.779.653	14,88
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	545.607.502	504.205.285	8,21
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	4.142.290.000	3.328.860.275	24,44
Beban Barang Operasional Lainnya	2.366.853.148	2.997.486.151	(21,04)
Beban Bahan	65.423.606.897	45.560.852.677	43,60
Beban Honor Output Kegiatan	2.694.017.000	3.956.124.407	(31,90)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	190.667.207.652	203.195.274.674	(6,17)
Beban Langganan Listrik	12.213.197.591	11.052.180.972	10,50
Beban Langganan Telepon	284.260.394	380.337.360	(25,26)
Beban Langganan Air	418.670.206	223.250.089	87,53
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	5.700.000	-	-
Beban Jasa Konsultan	93.060.000	-	-
Beban Sewa	7.452.459.015	3.321.048.747	124,40
Beban Jasa Profesi	10.910.735.128	8.932.388.426	22,15
Beban Jasa Lainnya	44.369.417.546	18.518.514.987	139,59
Beban Barang	10.572.003.443	6.265.416.457	68,74
Beban Jasa	14.385.436.462	9.088.327.013	58,28
Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	900.642.659	2.974.133.673	(69,72)
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	38.948.900	57.144.400	(31,84)
Beban Aset Ekstrakomtabel Konstruksi Dalam Pengerjaan	45.738.000	-	-
Jumlah	392.050.969.497	343.000.213.746	14,30

*Beban
Pemeliharaan
Rp15.775.340.892*

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp15.775.340.892 dan Rp18.076.932.036. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

**Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan
31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016**

Uraian	31 Des 2017 (Rp)	31 Des 2016 (Rp)	% Naik (Turun)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8.079.387.534	10.690.194.299	(24,42)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.183.304.402	6.151.988.988	(15,75)
Beban Pemeliharaan Jaringan	8.356.500	7.080.000	18,03
Beban Pemeliharaan Lainnya	12.984.000	35.741.000	(63,67)
Beban Pemeliharaan	1.464.411.529	-	-
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	1.015.054.842	1.190.404.808	(14,73)
Beban Persediaan suku cadang	11.842.085	1.522.941	677,58
Jumlah	15.775.340.892	18.076.932.036	(12,73)

Beban Perjalanan Dinas
Rp61.228.673.878

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp61.228.673.878 dan Rp43.899.426.164. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

**Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas
31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016**

Uraian Jenis Beban	31 Des 2017 (Rp)	31 Des 2016 (Rp)	% Naik (Turun)
Beban Perjalanan Dinas Biasa	40.469.139.208	30.645.421.794	32,06
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.833.419.059	2.517.576.324	12,55
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.193.019.957	1.576.097.718	39,14
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	5.967.155.133	4.850.543.461	23,02
Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	4.573.379.274	1.178.861.397	287,95
Beban Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	1.763.004.580	609.468.750	100,00
Beban Perjalanan	3.429.556.667	2.521.456.720	36,01
Jumlah	61.228.673.878	43.899.426.164	39,47

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
Rp0

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

Beban Bantuan Sosial
Rp0

D.8 Beban Bantuan Sosial

Tidak terdapat Beban Bantuan Sosial di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif.

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp60.593.467.337

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp60.593.467.337 dan Rp48.302.054.059. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan

manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Amortisasi mulai diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahunan 2016. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

**Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016**

Uraian	31 Des 2017 (Rp)	31 Des 2016 (Rp)	% Naik (Turun)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	27.832.461.476	19.226.387.679	44,76
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin - BLU	-	4.832.383.569	(100,00)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	28.268.160.457	16.037.898.953	76,26
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan - BLU	-	4.993.562.417	(100,00)
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	2.878.779.938	235.507.102	1.122,37
Beban Penyusutan Irigasi	597.789.698	157.939.302	278,49
Beban Penyusutan Jaringan	845.826.487	677.245.386	24,89
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLU	-	1.765.932.900	(100,00)
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	42.587.325	3.959.726	975,51
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya - BLU	-	27.500.000	(100,00)
Jumlah Penyusutan	60.465.605.381	47.958.317.034	26,08
Beban Amortisasi Software	37.930.625	73.198.177	(48,18)
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang Tidak Dijual dalam Operasional Pemerintah	-	9.093.750	(100,00)
Beban Amortisasi Software-Badan Layanan Umum	-	34.912.281	(100,00)
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Dijual dalam Operasional Pemerintah	89.931.331	226.532.817	(60,30)
Jumlah Amortisasi	127.861.956	343.737.025	(62,80)
	60.593.467.337	48.302.054.059	25,45

Beban Penyisihan
Piutang Tak tertagih
Rp127.787.333

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp127.787.333 dan Rp554.930.639. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

**Perbandingan Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016**

Uraian	31 Des 2017 (Rp)	31 Des 2016 (Rp)	Naik (Turun) %
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNB	121.817.992	485.926.378	(74,93)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	-	(46.498.656)	(100,00)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	-	115.502.917	(100,00)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	5.969.341	-	-
	127.787.333	554.930.639	(76,97)

Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp877.290.163

D.11 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Des 2017 (Rp)	31 Des 2016 (Rp)	Naik (Turun) %
Surplus Pelepasan Aset Non Lancar	468.115.496	(1.666.774.408)	(128,09)
<i>Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin</i>	175.134.000	73.469.500	138,38
<i>Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya</i>	490.753.999	78.611.249	524,28
<i>Kerugian Pelepasan Aset</i>	197.772.503	1.818.855.157	(89,13)
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	409.174.667	1.843.196.295	(77,80)
<i>Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara</i>	91.160.000	-	-
<i>Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu</i>	31.924.857	104.545.017	(69,46)
<i>Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu</i>	175.873.916	1.433.485.797	(87,73)
<i>Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu</i>	-	-	-
<i>Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi</i>	19.693.675	-	-
<i>Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan</i>	637.091.744	722.959.697	(11,88)
<i>Beban Penyesuaian Nilai Persediaan</i>	536.507.691	385.574.326	39,15
<i>Kerugian Persediaan Rusak/Usang</i>	-	1.346.400	-
<i>Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi</i>	10.061.834	30.873.490	(67,41)
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	877.290.163	176.421.887	397,27

Pos-Pos Luar Biasa
Rp0

D.12 POS-POS LUAR BIASA

Pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 tidak terdapat Pos Defisit dari Pos Luar Biasa di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Pos Defisit dari Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp2.144.570.112.820

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas awal pada tahun 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp2.144.570.112.820 dan Rp2.056.779.326.775.

Defisit LO
Rp(577.167.689.996)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar minus Rp577.167.689.996 dan minus Rp503.988.200.975. Surplus (Defisit) LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, sampai dengan pos luar biasa.

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi
Rp0

E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi

Tidak terdapat Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Penyesuaian Nilai Aset
Rp0

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Tidak terdapat Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Koreksi Nilai Persediaan
Rp0

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai Persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian Persediaan. Koreksi nilai Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp0 dan Rp315.123.700. Rincian Koreksi Nilai Persediaan per tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan per 31 Desember 2017

Rincian	Nilai (Rp)
Persediaan yang Belum Diregister	-
Barang Konsumsi	-
Bahan untuk Pemeliharaan	-
Persediaan BLU Pelayanan Pendidikan	-
Jumlah	-

Selisih Revaluasi Aset E.4.3 Selisih Revaluasi Aset

Aset

Rp4.642.496.469.899

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang Aset Tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp4.642.496.469.899 dan Rp0.

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap per 31 Desember 2017

Rincian	Nilai (Rp)
Tanah	4.476.923.290.075
Gedung dan Bangunan	25.446.311.043
Jalan dan Jembatan	(7.978.046.953)
Irigasi	(3.781.763.253)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	136.703.623.962
Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	11.803.247.234
Akumulasi Penyusutan Irigasi	3.379.807.791
Jumlah	4.642.496.469.899

Koreksi Nilai Aset

Non Revaluasi

Rp1.228.163.490

E.4.4 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi adalah transaksi yang mengoreksi Aset namun bukan diakibatkan revaluasi nilai, misalnya koreksi aset atas temuan auditor, reklasifikasi antar Aset yang menyebabkan perubahan penyusutan karena perbedaan masa manfaat Aset, dan koreksi atas kesalahan jurnal kirim SIMAK BMN ke SAIBA. Koreksi Penilaian Aset Non Revaluasi per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp1.228.163.490 dan minus Rp8.359.191.825.

Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi per 31 Desember 2017

Rincian	Nilai (Rp)
Peralatan dan Mesin	1.694.000
Gedung dan Bangunan	1.363.781.332
Jalan dan Jembatan	(1.998.332.071)
Irigasi	(41.971.965)
Jaringan	482.817.541
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	632.116.088
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(2.595.839.804)
Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	1.709.195.457
Akumulasi Penyusutan Irigasi	15.453.424
Akumulasi Penyusutan Jaringan	(40.234.795)
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	302.703.021
Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	1.396.781.262
Jumlah	1.228.163.490

Lain-lain

Rp59.997.327

E.4.5 Lain-lain

Koreksi Lain-lain per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah

masing-masing sebesar Rp59.997.327 dan Rp448.738.495. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas Pendapatan, koreksi atas Beban, koreksi atas Hibah, koreksi atas Piutang, dan koreksi atas Kewajiban. Rincian Koreksi Lain-lain per tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Lain-lain per 31 Desember 2017

Uraian	Jumlah (Rp)
Koreksi Beban	-
Koreksi Pendapatan	-
Koreksi Piutang	-
Koreksi Kewajiban	19.997.327
Koreksi Piutang	40.000.000
Jumlah	59.997.327

Transaksi Antar
Entitas

Rp611.070.073.698

E.5 Transaksi Antar Entitas

Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp611.070.073.698 dan Rp599.374.316.650. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN, maupun KL dengan BUN. Rincian per tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Transaksi antar Entitas terdiri dari:

Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2017

Uraian	Jumlah
Ditagihkan ke Entitas Lain	612.382.113.936
Diterima dari Entitas Lain	(4.585.621.055)
Transfer Keluar	(7.232.809.963)
Transfer Masuk	10.506.390.780
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung	-
	611.070.073.698

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2017, DDEL sebesar Rp4.585.621.055 sedangkan DKEL sebesar Rp612.382.113.936.

E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL, dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp10.506.390.780. Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp7.232.809.963. Rincian Transfer tahun 2017 disajikan pada Lampiran.

E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung entitas dalam bentuk kas, barang, maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp0.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp0.

Ekuitas Akhir
Rp6.822.257.127.238

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas per tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp6.822.257.127.238 dan Rp2.144.570.112.820.